

**PERLAKUAN AKUNTANSI KREDIT BERMASALAH (*NONPERFORMING LOAN*)
SEBELUM DAN SESUDAH PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN
NO. 31 EFEKTIF DICABUT PADA PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO)
Tbk**

SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta
untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan guna Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi**



Oleh :

Damar Pamungkas

12812147011

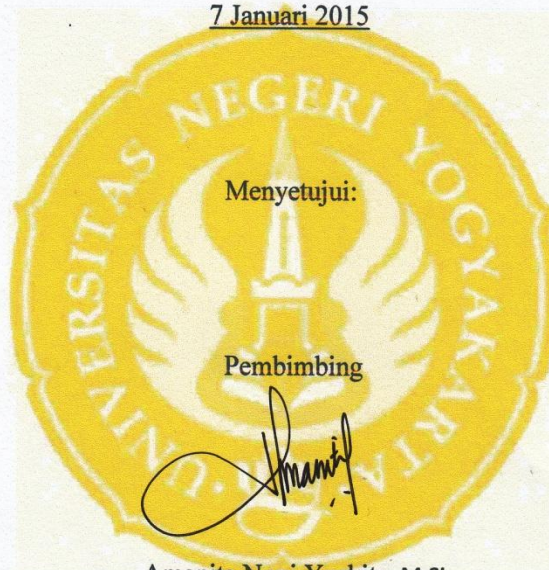
**PROGAM STUDI AKUNTANSI
JURUSAN PENDIDIKAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
2015**

HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul “ PERLAKUAN AKUNTANSI KREDIT BERMASALAH (*NONPERFORMING LOAN*) SEBELUM DAN SESUDAH PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN NO. 31 EFEKTIF DICABUT PADA PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO)Tbk “ ini telah disetujui oleh pembimbing untuk diujikan.

Disetujui pada tanggal:

7 Januari 2015



Amanita Novi Yushita, M.Si
NIP. 1977 0810200604 2002

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul :

**PERLAKUAN AKUNTANSI KREDIT BERMASALAH (*NONPERFORMING LOAN*)
SEBELUM DAN SESUDAH PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN
NO.31 EFEKTIF DICABUT PADA PT.BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk.**

yang disusun oleh :

DAMAR PAMUNGKAS
NIM.12812147011

Telah dipertahankan didepan Dewan Penguji pada tanggal 16 Maret 2015 dan
dinyatakan lulus

DEWAN PENGUJI

Nama	kedudukan	tanda tangan	tanggal
Abdullah Taman, SE.,Akt.M.Si	Ketua Penguji		10-04-2015
Ngadirin Setiawan, M.Si	Penguji Utama		05-04-2015
Amanita Novi Yushita, S.E.,M.Si	Sekretaris		20-03-2015

Yogyakarta, 17 April 2015

Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta
Dekan


Dr. Sugiharsono, M.Si
NIP. 195503281983031002

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

Dalam kehidupan siapa yang mempunyai cita-cita yang luhur seakan jalanya
tertuntun dan selalu berdoa kepada Allah SWT

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, atas rahmat dan hidayah-Nya, saya dapat menyelesaikan skripsi ini
dengan baik. Karya sederhana ini ku persembahkan untuk:

1. Ayahku (Alm) dan Ibuku tercinta, yang telah mendukungku, memberiku motivasi dalam segala hal serta memberikan kasih sayang yang teramat besar yang tak mungkin bisa ku balas dengan apapun.
2. Mas Fandy dan Mas Norman dan Mbak Anif, makasih telah memberiku motivasi dan makasih sudah sayang sama adikmu yang banyak maunya ini.
3. Teman – teman PKS 2012 Akuntansi UNY terima kasih telah memberi semangat setiap hari dan selalu mengingatkan ”ayo semangat”
4. Teman – teman kontrakan kandang macan (Yogi, Imam, Kinan, Cahyo, Mbah Alip, Ajik, Angga) terima kasih telah menemani dalam suka dan duka.
5. Teman – teman dikantor UPT Kecamatan Muntilan (Wawan, Anis, Yoyok) terima kasih sudah membantu memfasilitasi layanan internet Wi-fi.
6. Teman –teman KKN 45 senantiasa memberikan semangat dan doa.

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Damar Pamungkas

NIM : 12812147011

Jurusan : S1 Akuntansi

Fakultas : Fakultas Ekonomi

Judul : PERLAKUAN AKUNTANSI KREDIT BERMASALAH
(*NONPERFORMING LOAN*) SEBELUM DAN SESUDAH
PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN NO. 31
EFEKTIF DICABUT PADA PT. BANK NEGARA INDONESIA
(PERSERO) Tbk.

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini benar-benar karya sendiri. Sepanjang pengetahuan saya, tidak terdapat karya yang ditulis atau diterbitkan orang lain kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang lazim.

Yogyakarta, 7 Desember 2014

Yang menyatakan,



Damar Pamungkas
NIM. 12812147011

**PERLAKUAN AKUNTANSI KREDIT BERMASALAH (*NONPERFORMING LOAN*)
SEBELUM DAN SESUDAH PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN
NO. 31 EFEKTIF DICABUT PADA PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk**

**Oleh :
Damar Pamungkas
12812147011**

ABSTRAK

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlakuan akuntansi kredit bermasalah pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk sebelum dan sesudah PSAK No. 31 efektif dicabut dan kesesuaiannya dengan PSAK No. 55 (revisi 2011), PSAK No. 50 (revisi 2010) dan PSAK No. 60 (revisi 2010).

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Dokumentasi dan Wawancara langsung dengan pihak PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk terutama dibagian divisi kredit dan akunting. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif komparatif.

Berdasarkan hasil penelitian, perbedaan yang paling mendasar dalam perlakuan akuntansi *nonperforming loan* pada PT. Bank Negara Indonesia yaitu sebelum 1 Januari 2010 pembentukan cadangan kerugian atau Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif menggunakan ekspektasi kerugian kredit (*expectation loss*) yang ditentukan oleh pihak bank. Namun, setelah tanggal 1 Januari 2010 dalam perlakuan akuntansi instrumen keuangan aset, ekuitas, dan liabilitas pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. menggunakan PSAK No. 50 (revisi 2010), PSAK No. 55 (revisi 2011) dan PSAK No. 60 (revisi 2010) serta pembentukan cadangan kredit atau Cadangan Kerugian Penurunan Nilai berdasarkan kerugian kredit yang telah terjadi (*incured loss*) yang diambil dari data debitur tiga tahun sebelumnya. Pembentukan cadangan dengan menggunakan *incured loss* dinilai lebih efektif sebab memakai sumber data yang diambil dari data transaksi minimal tiga tahun sebelumnya, sehingga bank sulit untuk merekayasa laporan keuangannya.

Kata Kunci : Kredit bermasalah, *Incured loss*, *Expectation loss*, PSAK

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur peneliti panjatkan kepada Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir Skripsi yang berjudul “PERLAKUAN AKUNTANSI KREDIT BERMASALAH (*NONPERFORMING LOAN*) SEBELUM DAN SESUDAH PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN NO. 31 EFEKTIF DICABUT PADA PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk” dengan lancar. Penulis menyadari sepenuhnya, tanpa bimbingan dari berbagai pihak, Tugas Akhir Skripsi ini tidak akan dapat diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terimakasih yang tulus kepada:

1. Prof. Dr. Rochmat Wahab, M.Pd.M.A. Rektor Universitas Negeri Yogyakarta.
2. Dr. Sugiharsono, M.Si. Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta
3. Prof Sukirno, M.Si.Ph.D. Ketua Jurusan Pendidikan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta
4. Diah Setyorini, M.Si.Ak. Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta
5. Amanita Novi Yushita, M.Si. dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu dan dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan dan arahan selama penyusunan skripsi.

6. Ngadirin Setiawan, M.S. narasumber yang telah memberikan saran dan arahan dalam penyusunan skripsi.
7. Purwo Purnomo Putro staf recovery, sistem mesin virtual (SMV) dan NPL, karyawan BNI yang telah membantu dalam penelitian skripsi.
8. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah memberikan dorongan serta bantuan selama penyusunan tugas akhir ini.

Semoga semua amal baik mereka diterima Allah SWT dan dicatat sebagai amalan yang terbaik, Amin. Harapan peneliti mudah-mudahan apa yang terkandung di dalam penelitian ini bermanfaat bagi semua pihak.

Yogyakarta, 7 Desember 2014

Yang menyatakan,



Damar Pamungkas
NIM. 12812147011

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah	4
C. Rumusan Masalah	5
D. Tujuan Penelitian.....	5
E. Manfaat Penelitian.....	5
BAB II LANDASAN TEORI DAN PERTANYAAN PENELITIAN	6
A. Landasan Teori.....	6
1. Definisi Akuntansi	6
2. Pernyataan Standar Akuntansi (SAK).....	8
a. Pengertian Standar Akuntansi Keuangan	8
b. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No.31 Akuntansi Perbankan.....	9
c. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No.50 (Revisi 2010) Instrument Keuangan :Penyajian dan Pengungkapan.....	18

d. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 55 (Revisi 2011) Instrumen Keuangan :Pengakuan dan Pengukuran.	22
e. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No.60 Instrumen Keuangan : Pengungkapan	27
3. Kredit.....	31
a. Definisi Kredit	31
b. Pengakuan dan Pengukuran Kredit	33
c. Jenis Kredit sesuai dengan Kolektibilitasnya	33
4. Kredit Bermasalah (<i>Nonperforming Loan</i>)	35
a. Definisi Kredit Bermasalah (<i>Nonperforming Loan</i>)	35
b. Akuntansi Kredit Bermasalah (<i>Nonperforming Loan</i>). ..	37
c. Penyeselaian Kredit Bermasalah	38
5. Struktur Penyeselaian Kredit Bermasalah	39
B. Restrukturisasi Kredit.....	40
1. Modifikasi Persyaratan Kredit.....	40
2. Penambahan Fasilitas Kredit	43
3. Pengambilan Agunan/asset debitur	43
4. Konversi Kredit	44
C. Penelitian yang Relevan	44
1. Analisis Perlakuan untuk Kredit Bermasalah (<i>Nonperforming Loan</i>) sesuai PSAK No. 31 pada PT. Bank Mandiri (Persero)Tbk	44
2. Perlakuan Akuntansi Kredit Bermasalah (<i>Nonperforming Loan</i>) setelah pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Efektif dicabut pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero)Tbk.....	46
D. Kerangka Berpikir	46
E. Paradigma Penelitian.....	48
F. Pertanyaan Penelitian	49

BAB III METODE PENELITIAN	50
A. Lokasi Penelitian	50
B. Metode Pengumpulan data	50
C. Jenis Data	50
D. Metode Analisis Data	51
BAB IV HASIL PENELITIAN	53
A. Hasil Penelitian.....	53
Data Umum.....	53
a. Sejarah Berdirinya Bank Negara Indonesia	53
b. Visi, Misi dan Nilai Dasar Bank Negara Indonesia	59
c. Struktur Organisasi PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Sentra Kredit Kecil Cabang Yogyakarta	61
d. <i>Job Description</i> masing – masing Bagian.....	62
e. Produk-produk PT. Bank Negara Indonesia	67
B. Pembahasan	75
Data Khusus.....	75
a. Perlakuan Akuntansi Kredit Bermasalah (<i>Nonperforming Loan</i>).....	75
b. Perlakuan Akuntansi Pendapatan Bunga.....	81
c. Penyisihan Kerugian Kredit.....	85
d. Pinjaman yang Direstrukturisasi.....	91
e. Penghapusan Kredit.....	94
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	96
A. Kesimpulan	96
B. Saran	97
DAFTAR PUSTAKA	99
LAMPIRAN	101

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Pinjaman yang Diberikan Berdasarkan Jenis, Mata Uang dan Transaksi Dengan Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa dan Pihak Ketiga	77
2. Rasio Pinjaman Bermasalah PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	78
3. Kategori Golongan Berdasarkan Tunggalan Angsuran Bulanan Kredit	80
4. Penyisihan Minimum sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia.....	86
5. Perubahan Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai	91
6. Pinjaman yang Direstrukturisasi Berdasarkan Kolektibilitas	94

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. Restrukturisasi dan Penghapusan Kredit Macet.....	39
2. Paradigma Penelitian.....	48
3. Struktur Organisasi PT. Bank Negara Indonesia	61

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1. Laporan Tahunan PT. Bank Negara Indonesia.....	101
2. Produk PT. Bank Bank Negara Indonesia	123
3. Surat Ijin Penelitian	129
4. Penghitungan Rasio	131

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kegiatan perekonomian suatu negara tidak terlepas dari pembayaran uang, dimana industri perbankan memegang peranan yang sangat penting dan strategis dalam sistem perekonomian. Menurut Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan menyebutkan bahwa fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat yang bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak. Bank berfungsi untuk menjembatani kedua kelompok masyarakat yang saling membutuhkan. Masyarakat yang memiliki kelebihan dana dapat menyimpan uang mereka dalam bentuk tabungan, deposito atau giro pada bank, sedangkan masyarakat yang membutuhkan dana untuk modal usaha atau untuk memenuhi kebutuhan lainnya dapat memperoleh pinjaman dalam bentuk kredit yang disalurkan oleh bank.

Pendapatan terbesar bank berasal dari bunga, imbalan atau pembagian hasil usaha atas kredit yang disalurkan. Semakin banyak jumlah kredit yang disalurkan berarti potensi pendapatan semakin besar. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya tidak semua dana yang dihimpun dari masyarakat bisa disalurkan dengan baik sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan dan penyaluran kredit kepada masyarakat biasanya mengalami hambatan dalam

hal pengembalian pinjaman kepada pihak bank dan nyaris semua bank yang beroperasi di Indonesia mengalami kredit bermasalah. Kredit bermasalah atau kredit macet memberi dampak yang kurang baik bagi negara, masyarakat, dan perbankan Indonesia. Kemudian risiko yang ditimbulkan atas kredit macet yakni tidak terbayarnya kembali kredit yang diberikan baik sebagian maupun seluruhnya. Semakin besar kredit macet yang dihadapi, maka makin menurun pula tingkat kesehatan bank tersebut atau menurunnya profitabilitas yang diharapkan.

PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Merupakan salah satu dari bank yang dimiliki oleh Badan Usaha Milik Negara yang mengalami permasalahan kredit bermasalah (*nonperforming loan*). Jumlah pinjaman yang diberikan pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Pada tahun 2010, mengalami peningkatan sebesar 13,58 %. Adanya peningkatan kredit pada tahun 2010 menunjukkan tekad Bank Negara Indonesia untuk meningkatkan perannya sebagai lembaga intermediasi. Pada tanggal 31 Desember 2010 dan 2009, rasio kredit bermasalah bruto (rasio NPL-bruto) Bank Negara Indonesia terhadap jumlah pinjaman yang diberikan adalah sebesar 4,28% dan 4,68%. Sedangkan rasio kredit bermasalah bersih (rasio NPL-bersih) terhadap total pinjaman adalah sebesar 1,11% dan 0,84% dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2010 mengalami penurunan.

Hal ini mempengaruhi kepercayaan terhadap nasabah. Semakin besar jumlah kredit bermasalah, makin besar pula jumlah cadangan yang harus disediakan serta makin besar pula tanggungan bank untuk mengadakan

dana cadangan tersebut karena kerugian bank akan mengurangi modal sendiri. Salah satu ruang lingkup kegiatan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. adalah memberikan fasilitas kredit kepada sektor usaha, dimana kredit tersebut bersumber dari dana yang dihimpun dari giro, deposito, dan tabungan. Dalam menjalankan fungsinya sebagai bank umum, kebijaksanaan perkreditan PT. Bank Negara Indonesia senantiasa diarahkan pada semua sektor usaha dengan pemberian kredit jangka pendek dan menengah serta prioritas sektor-sektor yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Di Indonesia, prinsip akuntansi yang berlaku adalah Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Sebelum tanggal 1 Januari 2010, industri perbankan merupakan suatu perusahaan yang memiliki suatu karakteristik tersendiri dibuat suatu standar khusus untuk pelaporan keuangan yang dituang dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 31 (revisi 2000) mengenai perbankan. Namun, sejak 1 Januari 2010, Bank Indonesia mewajibkan seluruh perbankan di Indonesia menyusun laporan keuangannya berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 50 (revisi 2006) “Instrumen Keuangan: Penyajian dan Pengungkapan”, berisi persyaratan penyajian dari instrumen keuangan dan pengidentifikasian informasi yang harus diungkapkan, dan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 55 (revisi 2006) “Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran”, yang mengatur prinsip-prinsip dasar pengakuan dan pengukuran aset keuangan, kewajiban keuangan, dan kontrak pembelian dan penjualan item non-keuangan. Kedua standar tersebut telah sesuai dengan

International Financial Reporting System (IFRS) yang sebelumnya telah diterapkan oleh perbankan internasional. Hal ini mengakibatkan sejak tanggal 1 Januari 2010 pula Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No.31 efektif dicabut. Keputusan ini diambil agar perbankan Indonesia bisa diakui secara global untuk dapat bersaing dan menarik investor secara global.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis memilih judul “**Perlakuan Akuntansi Kredit Bermasalah (*Nonperforming Loan*) Sebelum dan Sesudah Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 31 Efektif Dicabut pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat diidentifikasi permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Risiko yang timbul atas kredit bermasalah yakni tidak terbayarnya kembali kredit yang diberikan baik sebagian maupun seluruhnya.
2. Dicabutnya Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 31 (Revisi 2000) mengenai Akuntansi Perbankan pada 1 Januari 2010.
3. Risiko yang ditimbulkan atas kredit macet yakni tidak terbayarnya kembali kredit yang diberikan baik sebagian maupun seluruhnya. Semakin besar kredit macet yang dihadapi, maka makin menurun pula tingkat kesehatan bank tersebut atau menurunnya profitabilitas yang diharapkan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka yang menjadi pokok masalah dalam penelitian ini adalah:

Bagaimana perlakuan akuntansi terhadap kredit bermasalah (*nonperforming loan*) pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. sebelum dan sesudah Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 31 efektif dicabut?

D. Tujuan Penelitian

Membandingkan kesesuaian antara perlakuan akuntansi yang diterapkan oleh PT. Bank Negara Indonesia (Persero) terhadap kredit bermasalah (*nonperforming loan*) dan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No.31 sebelum dan sesudah efektif dicabut.

E. Manfaat Penelitian

1) Manfaat Teoritis

Untuk memberikan informasi tentang perlakuan akuntansi terhadap kredit bermasalah (*nonperforming loan*) sebelum dan sesudah Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No.31 efektif dicabut.

2) Manfaat Praktik

Manfaat praktik dari penelitian ini adalah sebagai masukan bagi PT. Bank Tabungan Negara Indonesia Tbk dan pihak-pihak lain yang berkepentingan agar dapat mengambil kebijakan-kebijakan terkait dengan peningkatan kinerja karyawan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

BAB II

LANDASAN TEORI DAN PERTANYAAN PENELITIAN

A. Landasan Teori

1. Definisi Akuntansi

Menurut Ismail (2010:2), akuntansi dapat diartikan sebagai seni dalam melakukan pencatatan, penggolongan, dan pengikhtisaran, yang mana hasil akhirnya tercipta sebuah informasi seluruh aktivitas keuangan perusahaan. Tujuan akuntansi yang digambarkan dalam laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi yang bermanfaat untuk pengambilan keputusan para pemakai.

American Institute of Certified Public Accounting (AICPA) yang dikutip oleh Harahap, (2005:4), akuntansi adalah seni pencatatan, penggolongan, dan pengikhtisaran dengan cara tertentu dan dengan ukuran moneter, transaksi dan kejadian-kejadian yang umumnya bersifat keuangan dan termasuk menafsirkan hasil-hasilnya.

Dunia (2005:3) mengemukakan definisi akuntansi sebagai suatu sistem informasi yang memberikan laporan kepada berbagai pemakai atau pembuat keputusan mengenai aktivitas bisnis dari suatu kesatuan ekonomi. Akuntansi menghasilkan informasi yang berguna bagi pemakai, bagi pihak-pihak intern atau yang mengelola perusahaan dan bagi pihak-pihak luar perusahaan.

Menurut Kusnadi (2000 : 7) mengemukakan bahwa:

“Akuntansi adalah suatu seni atau keterampilan mengolah transaksi atau kejadian yang setidak-tidaknya dapat diukur dengan uang menjadi laporan keuangan dengan cara sedemikian rupa sistematisnya berdasarkan prinsip yang diakui umum sehingga para pihak yang berkepentingan atas perusahaan dapat mengetahui posisi keuangan dan hasil operasinya pada setiap waktu diperlukan dan daripadanya dapat diambil keputusan maupun pemilihan berbagai alternatif dibidang ekonomi.”

Menurut *Committee on Terminology of The American Institute of Certified Public Accountants* dalam buku Bastian dan Suharjono (2006), akuntansi adalah seni mencatat, menggolongkan, dan mengikhtisarkan transaksi serta peristiwa yang bersifat keuangan dengan suatu cara yang bermakna dan dalam satuan uang serta menginterpretasikan hasil-hasilnya.

Accounting Principle Board (APB) Statement mendefinisikan akuntansi sebagai suatu kegiatan jasa. Fungsinya adalah memberikan informasi kuantitatif, umumnya dalam ukuran uang, mengenai suatu badan ekonomi yang dimaksudkan untuk digunakan dalam pengambilan keputusan ekonomi yang digunakan dalam memilih keputusan terbaik di antara beberapa alternatif keputusan.

Dari beberapa pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa akuntansi adalah sebagai alat ukur yang memberikan informasi umumnya dalam ukuran uang mengenai suatu badan ekonomi yang berguna bagi pihak-pihak intern maupun ekstern perusahaan dalam mengambil keputusan.

2. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (SAK)

a. Pengertian Standar Akuntansi Keuangan

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan merupakan aturan dan pedoman bagi manajemen dalam menyusun laporan keuangan. Dengan adanya Standar Akuntansi yang baik, laporan keuangan menjadi lebih berguna, dapat diperbandingkan, tidak menyesatkan dan dapat menciptakan transparansi perusahaan.

Maria (2007:12) mendefinisikan Standar Akuntansi Keuangan yang berisi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) adalah: “Standar yang digunakan pedoman pokok penyusunan dan penyajian laporan keuangan bagi perusahaan, dana pensiun, dan unit ekonomi lainnya agar laporan keuangan lebih berguna, dapat dimengerti dan dapat dibandingkan serta tidak menyesatkan. Standar akuntansi keuangan (SAK) yang dibuat oleh IAI selalu mengikuti perkembangan *International Accounting Standards Committee* (IASC). Selain mengikuti IAS, SAK juga mempertimbangkan berbagai faktor lingkungan usaha yang ada di Indonesia sehingga diharapkan SAK yang diterbitkan dapat sesuai dengan tuntutan kebutuhan dunia usaha di Indonesia juga sejalan dengan standar akuntansi internasional.”

b. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.31 Akuntansi Perbankan

1) Pengukuran dalam nilai uang

Laporan keuangan bank harus disajikan dalam mata uang rupiah. Dalam hal bank memiliki aktiva, kewajiban dan komitmen serta kontinjensi dalam valuta asing, harus dijabarkan kedalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah yang berlaku pada tanggal laporan. Untuk modal yang disetor dalam valuta asing dijabarkan dengan menggunakan kurs konversi Bank Indonesia pada saat modal tersebut disetor (historical rate). Kurs tengah yaitu kurs jual ditambah kurs beli Bank Indonesia dibagi dua. Dalam hal kurs mata uang asing tidak tersedia di Bank Indonesia, digunakan kurs jual ditambah kurs beli bank yang bersangkutan dibagi dua. Bank wajib mengungkapkan posisi neto aktiva dan kewajiban dalam valuta asing yang masih terbuka (posisi devisa neto).

2) Laporan keuangan bank

Untuk memenuhi kepentingan berbagai pihak, laporan keuangan harus disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dan pernyataan ini. Laporan keuangan terdiri atas :

- a) Neraca
- b) Laporan komitmen dan kontinjensi

- c) Laporan laba rugi
- d) Laporan arus kas
- e) Catatan atas laporan keuangan

3) Neraca

- a) Dalam penyajiannya, aktiva dan kewajiban dalam neraca bank tidak dikelompokkan menurut lancar dan tidak lancar, namun sedapat mungkin tetap disusun menurut jatuh tempo.
- b) Komponen-komponen neraca bank disusun dengan mengacu pada SAK untuk pos-pos yang bersifat umum dan mengacu pada pernyataan ini untuk pos-pos yang bersifat khusus perbankan.
- c) Setiap aktiva produktif disajikan di neraca sebesar jumlah bruto dari tagihan atau penempatan bank dikurangi dengan penyisihan penghapusan yang dibentuk untuk menutup kemungkinan kerugian yang timbul dari masing-masing aktiva produktif dari masing-masing jenis aktiva produktif yang bersangkutan.

4) Laporan komitmen dan kontinjensi

- a) Laporan komitmen dan kontinjensi wajib disusun secara sistematis, sehingga dapat memberikan gambaran mengenai posisi komitmen dan kontinjensi, baik yang bersifat tagihan maupun kewajiban, pada tanggal laporan.

- b) komitmen adalah suatu iklan atau kontrak berupa janji yang tidak dapat dibatalkan secara sepihak, dan harus dilaksanakan apabila persyaratan yang disepakati bersama dipenuhi, seperti komitmen kredit, komitmen penjualan atau pembelian aktiva bank dengan syarat "repurchase agreement" (Repo), serta komitmen penyediaan fasilitas perbankan lainnya.
- c) Kontinjensi adalah tagihan atau kewajiban bank yang kemungkinan timbulnya tergantung pada terjadi atau tidak terjadinya satu atau lebih peristiwa dimasa yang akan datang.
- d) Sistematika penyajian laporan komitmen dan kontinjensi disusun berdasarkan urutan tingkat kemungkinan pengaruhnya terhadap perubahan posisi keuangan dan hasil usaha bank.
- e) Komitmen dan kontinjensi, baik yang bersifat sebagai tagihan maupun kewajiban, masing-masing disajikan secara tanpa pos lawan.

5) Laporan Laba Rugi

- a) Laporan Laba rugi bank wajib disusun sedemikian rupa agar dapat memberikan gambaran mengenai hasil usaha bank dalam suatu periode tertentu.
- b) Laporan Laba rugi bank disusun dalam bentuk berjenjang yang menggambarkan pendapatan atau beban yang berasal dari kegiatan utama bank dan kegiatan lainnya.

- c) Cara penyajian laporan laba rugi bank adalah sebagai berikut :
- (1) Wajib memuat secara rinci unsur pendapatan bunga dan beban.
 - (2) Unsur pendapatan dan beban harus dibedakan antara pendapatan dan beban yang berasal dari kegiatan operasional dan non-operasional.
- d) Komponen-komponen laporan laba rugi bank disusun dengan mengacu pada SAK untuk pos-pos yang bersifat umum dan pernyataan ini untuk pos-pos yang bersifat khusus perbankan.

6) Laporan Arus Kas

Laporan arus kas, sesuai dengan pernyataan standar akuntansi keuangan PSAK No. 2 tentang laporan arus kas, harus disusun berdasarkan konsep kas selama periode laporan. Laporan ini harus menunjukkan semua aspek penting dari kegiatan bank, tanpa memandang apakah transaksi tersebut berpengaruh langsung pada kas.

7) Catatan atas laporan keuangan

Disamping hal-hal yang wajib diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan sebagaimana dijelaskan dalam SAK dan pernyataan ini, bank juga wajib mengungkapkan dalam catatan tersendiri mengenai posisi neto menurut jenis, dan penyaluran kredit kelolaan.

8) Laporan keuangan gabungan dan konsolidasi

Bank yang mempunyai kantor cabang atau kantor operasional lainnya wajib menyusun laporan keuangan gabungan pada setiap tanggal laporan, yang meliputi seluruh kantornya baik yang ada didalam maupun diluar negeri. Dalam membuat laporan gabungan, saldo rekening antar kantor (termasuk pendapatan dan beban) wajib dieliminasi sedemikian rupa sehingga mencerminkan posisi keuangan dan hasil bank secara wajar.

Bank yang mempunyai satu atau lebih anak perusahaan yang memenuhi persyaratan tertentu, wajib membuat laporan konsolidasi yang meliputi posisi keuangan dan hasil usaha bank dan seluruh anak perusahaan pada akhir periode laporan :

- a) Laporan konsolidasi tersebut dibuat bagi bank yang memiliki saham atau hak kepemilikan atas lembaga keuangan lain yang jumlahnya 50% atau kurang wajib diungkapkan dalam laporan keuangan.
- b) Dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasi saldo rekening-rekening yang menampung transaksi-transaksi antar perusahaan induk dan atau anak perusahaan wajib dieliminasi sedemikian rupa sehingga dapat mencerminkan posisi keuangan serta hasil usaha bank secara wajar.

- c) Pengecualian dari kewajiban penyusunan laporan keuangan konsolidasi diatas dapat dilakukan apabila memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam SAK.

9) Laporan keuangan interim

Laporan keuangan interim yang meliputi periode bulanan atau triwulanan merupakan bagian integral dari laporan keuangan tahunan. Oleh karena itu laporan keuangan interim tersebut wajib disusun berdasarkan prinsip akuntansi yang sama dengan laporan keuangan tahunan.

10) Akuntansi pendapatan dan beban

- a) Pengakuan pendapatan dan beban bunga. Dasar yang digunakan dalam pengakuan pendapatan dan beban bank merupakan hal yang fundamental dalam hubungannya dengan pengukuran tingkat rentabilitas. Kegiatan utama bank adalah memupuk dana yang pada umumnya adalah berbunga dan menanamkannya dalam aktiva produktif. Seperti pada industri lainnya, slalu terdapat kemungkinan perbedaan waktu antara pendapatan dan terjadinya beban atas penggunaan sumber daya untuk menghasilkan pendapatan tersebut. Oleh karena itu, pengkaitan antara pendapatan dan beban bank tidak mudah dilakukan, sehingga dalam pengakuan pendapatan perlu diperhatikan sifat dari keunikan usaha bank tersebut.

- b) Pendapatan dan beban bunga diakui secara akrual. Pendapatan bunga dari kredit dan aktiva produktif lainnya yang "non performing". Tersebut benar-benar telah diterima tidak dapat diakui sebagai pendapatan dalam periode laporan dan harus dilaporkan dalam laporan komitmen dan kontinjensi.
- c) Pendapatan bunga terdiri atas pendapatan bunga dan pendapatan lainnya yang berkaitan langsung dengan pemberian kredit seperti provisi dan komisi.
- d) Beban bunga terdiri atas beban bunga dan beban lainnya yang dikeluarkan secara langsung dalam rangka penghimpunan dana tersebut seperti hadiah, premi atau diskonto dari kontrak berjangka dalam rangka pendanaan.

11) Pengakuan pendapatan beban atas komisi dan provisi

- a) Komisi dan provisi yang berkaitan langsung dengan kegiatan perkreditan diperlukan sebagai pendapatan atau beban yang ditangguhkan dan diamortisasi secara sistematis selama jangka waktu komitmen kredit. Apabila komitmen tersebut diselesaikan sebelum jangka waktunya maka sisa komisi dan provisi diakui sebagai pendapatan atau beban pada saat penyelesaian komitmen tersebut.

- b) Komisi dan provisi yang tidak berkaitan langsung dengan kegiatan perkreditan namun terkait dengan jangka waktu diperlukan sebagai pendapatan atau beban pada saat terjadinya transaksi.

12) Pengakuan pendapatan dan beban atas transaksi valuta asing

Laba rugi yang timbul dari transaksi valuta asing harus diakui sebagai pendapatan atau beban dalam laporan laba rugi periode berjalan. Selisih penjabaran aktiva dan kewajiban dalam mata uang asing kedalam mata uang rupiah harus diakui sebagai pendapatan atau beban dalam laporan laba rugi periode berjalan.

13) Akuntansi aktiva

- a) kas adalah mata uang kertas dan logam baik rupiah maupun valuta asing yang masih berlaku sebagai alat pembayaran yang sah.

- b) Giro pada Bank Indonesia

Giro pada bank Indonesia adalah saldo rekening giro bank baik dalam rupiah maupun dalam valuta asing di bank Indonesia.

- c) Giro pada bank lain

Giro pada bank lain adalah saldo rekening giro bank baik dalam rupiah maupun dalam valuta asing di bank lain.

d) Penempatan pada bank lain

Penempatan pada bank lain adalah penanaman dana bank pada bank lain, baik didalam negeri maupun diluar negeri, dalam bentuk interbank callmoney, tabungan, deposito berjangka, dan lain-lain yang sejenis, yang dimaksudkan untuk memperoleh penghasilan.

e) kredit yang diberikan

Kredit yang diberikan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan. Termasuk dalam pengertian kredit dalam proses penyelamatan.

f) Penyertaan

Penyertaan adalah penanaman dana bank dalam bentuk saham perusahaan lain tujuan investasi jangka panjang, baik dalam rangka pendirian, ikut serta dalam lembaga keuangan lain, penyelamatan kredit atau lainnya.

g) Aktiva lain-lain

Aktiva lain-lain merupakan pos yang dimaksudkan untuk menampung aktiva-aktiva yang tidak dapat digolongkan

kedalam pos-pos tersebut diatas dan tidak cukup material disajikan dalam pos tersendiri.

c. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 50 (Revisi 2010)

Instrumen Keuangan : Penyajian dan Pengungkapan

1. Kategori Aset Keuangan dan Ekuitas

Saham preferen dapat diterbitkan dengan berbagai jenis hak. Dalam menentukan apakah saham preferen merupakan liabilitas keuangan atau instrumen ekuitas, penerbit menilai hak-hak tertentu yang melekat pada saham untuk menentukan apakah saham tersebut memiliki karakteristik fundamental suatu liabilitas keuangan. Sebagai contoh, saham preferen yang memberi hak kepada pemegangnya untuk menebus saham tersebut pada tanggal yang telah ditetapkan atau pada tanggal yang dipilih oleh pemegangnya mengandung liabilitas keuangan karena penerbit berkewajiban menyerahkan aset keuangan pada pemegang saham. Potensi ketidakmampuan penerbit dalam memenuhi kewajibannya untuk menebus saham preferen tersebut sesuai dengan kontrak, baik disebabkan karena tidak tersedianya dana, atau karena dibatasi peraturan perundang-undangan, atau karena tidak memadainya laba atau cadangan, tidak membatalkan kewajibannya tersebut. Suatu opsi bagi penerbit untuk menebus saham secara kas tidak memenuhi definisi suatu liabilitas keuangan karena penerbit tidak memiliki

kewajiban saat ini untuk mentransfer aset keuangan kepada pemegang saham. Dalam kasus ini, penebusan saham sepenuhnya didasarkan pada kebijakan penerbit. Namun demikian, suatu kewajiban dapat timbul ketika penerbit saham melaksanakan opsi yang dimilikinya, biasanya dengan pemberitahuan formal kepada pemegang saham tentang niat untuk menebus saham-saham tersebut. Prinsip penyajian instrumen keuangan sebagai liabilitas atau ekuitas dan saling hapus aset keuangan dan liabilitas keuangan. mengenai prinsip-prinsip tersebut sudah diungkapkan dalam PSAK 60: Instrumen Keuangan: Pengungkapan dalam penyajian laporan keuangan :

- a) Penerbit instrumen keuangan pada saat pengakuan awal mengategorikan instrumen tersebut atau komponen-komponennya sebagai liabilitas keuangan, aset keuangan, atau instrumen ekuitas sesuai dengan substansi perjanjian kontraktual dan definisi liabilitas keuangan, aset keuangan
- b) Instrumen yang mempunyai fitur opsi jual (puttable instrument)
- c) Instrumen, atau komponen instrumen, yang mensyaratkan suatu kewajiban kepada Entitas untuk menyerahkan ke Pihak lain bagian aset neto entitas secara pro rata hanya pada saat likuidasi.

- d) Tanpa kewajiban kontraktual untuk menyerahkan kas atau aset keuangan lainnya
- e) Penyelesaian dengan instrumen ekuitas yang diterbitkan entitas

2. Ketentuan dan tanggal efektif

Entitas menerapkan Pernyataan secara prospektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari. Penerapan lebih dini dianjurkan. Jika entitas menerapkan pernyataan ini lebih awal, maka entitas mengungkapkan fakta tersebut.

3. Saham Treasuri

Jika entitas memperoleh kembali instrument ekuitasnya, instrumen-instrumen tersebut (saham treasuri) dikurangkan dari ekuitas. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari pembelian, penjualan, penerbitan, atau pembatalan instrumen ekuitas entitas tersebut tidak dapat diakui dalam laporan laba rugi. Saham treasuri tersebut dapat diperoleh dan dimiliki oleh entitas yang bersangkutan atau oleh anggota lain dalam kelompok usaha yang dikonsolidasi. Jumlah yang dibayarkan atau diterima diakui secara langsung di ekuitas.

4. Bunga, Dividen, Kerugian dan Keuntungan

Bunga, dividen, kerugian dan keuntungan yang berkaitan dengan instrumen keuangan atau komponen yang merupakan

liabilitas keuangan diakui sebagai pendapatan atau beban dalam laporan laba rugi. Distribusi kepada pemegang instrumen ekuitas didebit oleh entitas secara langsung ke ekuitas, setelah dikurangi dampak pajak penghasilan terkait. Biaya transaksi yang timbul dari transaksi ekuitas, dicatat sebagai pengurang ekuitas, setelah dikurangi dampak pajak penghasilan terkait.

5. Saling Hapus antar Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan

Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus dan nilai netonya disajikan dalam laporan posisi keuangan jika, dan hanya jika, entitas:

- a) saat ini memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut.
- b) berniat untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara simultan.

Dalam akuntansi untuk transfer atas aset keuangan yang tidak memenuhi kualifikasi penghentian pengakuan, maka entitas tidak boleh melakukan saling hapus aset keuangan yang ditransfer dan liabilitas terkait.

d. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 55 (Revisi 2011)

Instrumen Keuangan : Pengakuan dan Pengukuran

Tujuan pernyataan ini adalah untuk mengatur prinsip-prinsip dasar pengakuan dan pengukuran aset keuangan, kewajiban keuangan, dan kontrak pembelian atau penjualan item non keuangan.

1) Pengakuan Awal

- a) Pengakuan awal aset keuangan atau liabilitas keuangan tidak diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, nilai wajar tersebut ditambah biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan atau penerbitan aset keuangan atau liabilitas keuangan tersebut. penyelesaian.
- b) Aset yang setelah pengakuan awal diukur pada biaya perolehan atau biaya perolehan diamortisasi, maka aset tersebut diakui pertama kali pada nilai wajar pada tanggal transaksi.

2) Pengukuran setelah Pengakuan Awal

- a) Aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual dan aset keuangan dan liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi dan pada nilai wajarnya.

- b) Kredit yang diberikan, piutang serta investasi dimiliki yang hingga jatuh tempo dan liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortasi diukur pada biaya perolehan diamortasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

3) Penghentian Pengakuan

- a) Aset keuangan dihentikan pengakuannya jika hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir.
- b) Pinjaman yang diberikan atau aset keuangan lain dihapus bukukan ketika tidak terdapat prospek yang realistis mengenai pengembalian kredit dalam waktu dekat atau hubungan normal antara bank dan debitur telah berakhir. Kredit yang tidak dapat dilunasi dihapus bukukan dengan mendebit penyisihan kerugian penurunan nilai. Penerimaan kemudian atas kredit yang telah dihapus bukukan sebelumnya, jika pada periode berjalan dikreditkan ke dalam akun penyisihan kerugian penurunan nilai atas kredit yang diberikan di laporan posisi keuangan, sedangkan jika setelah tanggal laporan posisi keuangan dikreditkan sebagai pendapatan operasional lainnya.

4) Pengakuan Pendapatan dan Beban

- a) Aset tersedia untuk dijual serta aset keuangan dan liabilitas keuangan yang dicatat berdasarkan biaya perolehan diamortasi, pendapatan dan beban bunga diakui pada laporan laba rugi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.
- b) Keuntungan dan kerugian yang belum terealisasi yang timbul dari perubahan nilai wajar melalui laporan laba rugi diakui pada laporan laba rugi.
- c) Pada saat aset keuangan dihentikan pengakuannya atau mengalami penurunan nilai, keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam laporan laba rugi komperhensif harus diakui pada laporan laba rugi.

5) Keuntungan dan Kerugian

Keuntungan atau kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar aset keuangan atau kewajiban keuangan yang bukan merupakan bagian dari hubungan lindungan nilai, diakui sebagai berikut :

- a) Keuntungan atau kerugian atas aset keuangan atau kewajiban keuangan yang diklasifikasikan sebagai instrument yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi diakui pada laporan laba rugi.

b) Keuntungan dan kerugian atas aset keuangan tersedia untuk dijual diakui secara langsung dalam ekuitas, yaitu melalui laporan perubahan ekuitas, kecuali untuk kerugian akibat penurunan nilai dan keuntungan atau kerugian akibat perubahan nilai tukar, sampai aset keuangan tersebut dihentikan pengakuannya, dan pada saat yang sama keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam ekuitas harus diakui pada laporan laba rugi. Namun bunga yang dihitung menggunakan metode suku bunga efektif diakui pada laporan laba rugi.

6) Aset Keuangan yang Dicatat Berdasarkan Biaya perolehan Diamortasi

Jika terdapat bukti obyektif bahwa kerugian penurunan nilai telah terjadi atas pinjaman yang diberikan dan piutang atau investasi dimiliki hingga jatuh tempo yang dicatat pada biaya perolehan diamortasi, maka jumlah kerugian tersebut diukur sebagai selisih antara nilai tercatat aset dengan nilai kini estimasi arus kas masa datang (tidak termasuk kerugian kredit di masa datang yang belum terjadi) yang didiskontokan menggunakan suku bunga efektif awal dari aset tersebut (yaitu suku bunga yang dihitung saat pengakuan awal). Nilai tercatat aset tersebut dikurangi baik

secara langsung maupun menggunakan pos cadangan. Jumlah kerugian yang terjadi dikui pada laporan laba rugi.

7) Saling Hapus

Aset keuangan dilakukan saling hapus dan nilai bersihnya disajikan dalam laporan posisi keuangan jika, dan hanya jika bank yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut dan adanya maksud untuk menyelesaikan secara netto atau untuk merealisasikan aset dan liabilitasnya secara simultan. Pendapatan dan beban disajikan dalam jumlah bersih hanya jika diperkenankan oleh standar akuntansi.

8) Pengukuran Biaya Diamortisasi

Biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan atau liabilitas keuangan yang diukur pada aset pengakuan awal dikurangi pembayaran pokok pinjaman, ditambah atau dikurangi amortisasi kumulatif menggunakan metode suku bunga efektif yang dihitung dari selisih anatar nilai pengakuan awal dan nilai jatuh temponya, dan dikurangi penurunan nilai.

9) Pengukuran nilai wajar

Nilai wajar Adela dimana suatu aset dapat dipergunakan, atau suatu liabilitas dapat diselesaikan,

diantara para pihak yang memahami untuk melakukan transaksi yang wajar pada tanggal pengukuran.

10) Metode suku bunga efektif

Metode yang digunakan untuk menghitung biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan atau liabilitas keuangan (atau kelompok aset keuangan atau liabilitas keuangan) dan metode untuk mengalokasikan pendapatan bunga atau beban pendapatan bunga atau bunga selama periode relevan. Suku bunga efektif adalah suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi pembayaran atau penerimaan kas dimasa depan selama perkiraan umur dari instrument keuangan, atau jika lebih tepat, digunakan periode lebih singkat untuk memperoleh nilai tercatat bersih dari aset keuangan liabilitas keuangan.

e. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 60 Instrumen Keuangan : Pengungkapan

1) Kategori Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan

Nilai tercatat untuk setiap kategori berikut, sebagaimana didefinisikan dalam PSAK 55 (Revisi 2006) diungkapkan dalam laporan keuangan atau atas laporan keuangan :

- a) Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi.

- b) Investasi dimiliki hingga jatuh tempo.
- c) Pinjaman yang diberikan dan piutang.
- d) Liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi.

2) Penyisihan Kerugian Kredit

Ketika aset keuangan mengalami penurunan nilai karena kerugian kredit dan entitas mencatat penurunan nilai dalam pos terpisah (misalnya pos penyisihan digunakan untuk mencatat penurunan nilai individual atau pos serupa yang digunakan untuk mencatat penurunan kolektif atas aset keuangan) daripada secara langsung mengurangi nilai tercatat aset keuangan, maka entitas mengungkapkan suatu rekonsiliasi perubahan pada akun tersebut selama periode untuk setiap aset keuangan.

3) Pos-pos Penghasilan, Beban, Keuntungan, dan Kerugian

Entitas mengungkapkan pos penghasilan, beban, keuntungan atau kerugian berikut ini pada laporan laba rugi komperhensif atau catatan atas laporan keuangan.

a) Laba atau Rugi.

- (1) Aset keuangan atau Liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, yang menunjukkan secara terpisah aset keuangan

atau liabilitas keuangan yang telah ditetapkan untuk diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi pada saat pengakuan awal, dan aset keuangan atau liabilitas keuangan yang dikategorikan sebagai dimiliki untuk diperdagangkan sesuai PSAK (Revisi 2006).

- (2) Aset keuangan tersedia dijual, yang menunjukkan secara terpisah jumlah keuntungan atau kerugian yang diakui pada pendapatan komperhensif lain selama periode, dan jumlah yang dipindahkan dari ekuitas ke dalam laporan laba rugi tersebut.
 - (3) Investasi dimiliki hingga jatuh tempo.
 - (4) Pinjaman yang diberikan dan piutang.
 - (5) Liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi.
- b) Total pendapatan bunga dan total bunga (dihitung dengan menggunakan metode suku bunga efektif) untuk aset keuangan atau liabilitas keuangan yang tidak diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi.
 - c) Pendapatan bunga dari aset keuangan yang mengalami penurunan nilai yang diakui sesuai PA 109 PSAK 55.
 - d) Jumlah kerugian penurunan nilai setiap kelompok aset keuangan

4) Pengungkapan Lain

Sesuai PSAK 1 (Revisi 2009) tentang penyajian laporan keuangan paragraph 114, entitas mengungkapkan dalam ikhtisar kebijakan akuntansi yang signifikan, dasar pengukuran yang digunakan dalam menyusun laporan keuangan dan kebijakan akuntansi lain yang relevan untuk pemahaman suatu laporan keuangan.

5) Nilai Wajar

Setiap kelompok aset dan kewajiban keuangan, entitas harus mengungkapkan nilai wajar setiap kelompok aset dan kewajiban tersebut dengan cara yang memungkinkan untuk dapat diperbandingkan dengan nilai tercatat dalam neraca. (PSAK 55 (Revisi 2006) memberikan pedoman penentuan nilai wajar).

Dalam pengungkapan nilai wajar, entitas mengelompokkan aset keuangan dan liabilitas keuangan dalam kelompok-kelompok, namun saling hapus dalam laporan keuangan.

Entitas mengungkapkan untuk setiap kelompok instrument keuangan, metode dan, ketika teknik penilaian digunakan, asumsi yang diterapkan dalam menentukan nilai wajar untuk setiap kelompok aset keuangan atau liabilitas keuangan.

3. Kredit

a. Definisi Kredit

Menurut Suparmo (2009:152) Kata Kredit berasal dari kata Romawi yaitu *Credere* yang artinya percaya. Sedangkan dalam bahasa Belanda istilahnya *Vertrouwen*, dalam bahasa Inggris yaitu *Believe* atau *trust or confidence* yang artinya sama yaitu kepercayaan. Dengan kata lain, kredit mengandung pengertian adanya suatu perkataan dari seseorang atau badan yang diberikan kepada seseorang atau badan lainnya yaitu bahwa yang bersangkutan pada masa yang akan datang akan memenuhi segala sesuatu kewajiban yang telah diperjanjikan terlebih dahulu.

Menurut Pasal 1 angka 11 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang perbankan bahwa kredit adalah penyediaan uang dan tagihan yang dapat disamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak meminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Dari pengertian di atas dapatlah dijelaskan bahwa kredit atau pembiayaan dapat berupa uang atau tagihan yang nilainya diukur dengan uang, misalnya bank membiayai kredit untuk pembelian rumah atau mobil. Kemudian adanya kesepakatan antara bank (kreditur) dengan nasabah penerima kredit (debitur) bahwa mereka sepakat sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat. Dalam perjanjian

kredit tercakup hak dan kewajiban masing-masing pihak, termasuk jangka waktu serta bunga yang ditetapkan bersama. Demikian pula dengan masalah sanksi apabila debitur mengingkari janji yang telah dibuat bersama.

Menurut Mulyono (2002:12) mendefinisikan kredit sebagai:

“Suatu penyerahan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan bunga jumlah imbalan atau pembagian hasil keuntungan”.

Bastian dan Suharjono (2006:65) mendefinisikan kredit adalah

“peminjaman uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak meminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan”.

Ikatan Akuntan Indonesia (2000) mendefinisikan kredit dalam pernyataan Standar Akuntansi Keuangan adalah:

“Peminjaman atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak meminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan. Hal ini yang termasuk dalam pengertian kredit yang diberikan adalah kredit dalam rangka pembiayaan bersama, kredit dalam restrukturisasi, dan pembelian surat berharga nasabah yang dilengkapi dengan *Note Purchase Agreement* (NPA)”.

Menurut Ensiklopedia Umum, kredit adalah

“sistem keuangan untuk memudahkan pemindahan modal dari pemilik kepada pemakai dengan pengharapan memperoleh keuntungan. Kredit diberikan berdasarkan kepercayaan orang lain yang memberikannya terhadap kecakapan dan kejujuran si peminjam. Dari definisi-definisi di atas dapat disimpulkan bahwa kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan

dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak meminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan”.

b. Pengakuan dan Pengukuran Kredit

Ikatan Akuntansi Indonesia dalam PSAK No. 31 (2000:12) menyatakan kredit diakui pada saat pencairannya sebesar pokok kredit. Kredit dalam rangka pembiayaan bersama diakui sebesar pokok kredit yang merupakan porsi tagihan bank yang bersangkutan. Pada saat bank menandatangani perjanjian kredit dengan debitur, bank mengakui kewajiban komitmen fasilitas kredit yang diberikan kepada debitur sebesar plafon kredit yang diperjanjikan atau yang dapat ditarik sesuai jadwal penarikan/penggunaan kredit yang disepakati dengan debitur untuk penerusan atau kredit kelolaan. Kredit diakui sebesar pokok kredit atau debet.

Pada umumnya, kredit diukur menggunakan biaya historis (*historical cost*) dimana asset dicatat sebesar pengeluaran kas (atau setara kas) yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan (*consideration*) yang diberikan untuk memperoleh asset tersebut pada saat perolehan.

c. Jenis Kredit Sesuai dengan Kolektibilitasnya

Menurut Ismail (2010: 219), kredit dapat dibedakan sesuai dengan kolektibilitas/kualitas/penggolongan kredit, yaitu *performing loan* dan *nonperforming loan*. Penggolongan kredit menjadi *performing loan* dan *nonperforming loan* didasarkan pada

kriteria kualitatif dan kuantitatif. Penilaian penggolongan kredit secara kualitatif didasarkan pada prospek usaha debitur dan kondisi keuangan usaha debitur. Kondisi keuangan debitur dapat dilihat dari kemungkinan kemampuan debitur untuk membayar kembali pinjamannya dari hasil usahanya. Penggolongan kredit sesuai kuantitatif didasarkan pada pembayaran angsuran oleh debitur yang tercermin dalam catatan bank. Pembayaran angsuran kredit mencakup pembayaran pinjaman pokok dan bunga.

Performing loan merupakan penggolongan kredit atas kualitas kredit nasabah yang lancar dan/atau terjadi tunggakan sampai dengan 90 hari. *Performing loan* dibagi menjadi dua yaitu kredit lancar dan kredit dalam perhatian khusus. Dalam hal kredit angsuran (*installment loan*), maka yang tergolong dalam kredit lancar yaitu kredit yang tidak terdapat tunggakan. Setiap tanggal jatuh tempo angsuran, debitur dapat membayar pinjaman pokok dan bunga. Kredit dalam perhatian khusus adalah penggolongan kredit yang tertunggak baik angsuran, pinjaman pokok dan pembayaran bunga, akan tetapi tunggakannya sampai dengan 90 hari (tidak melebihi 90 hari kalender). *Nonperforming loan* merupakan kredit yang menunggak melebihi 90 hari. *Nonperforming loan* dibagi menjadi tiga yaitu kredit kurang lancar, kredit diragukan, dan kredit macet. Menurut ketentuan Bank Indonesia, kredit bermasalah digolongkan menjadi tiga yaitu kredit

dengan kualitas kurang lancar, diragukan dan macet. Dalam hal kredit angsuran (*installment loan*), maka kredit kurang lancar terjadi bila debitur tidak dapat membayar angsuran pokok dan/atau bunga antara 91 hari sampai dengan 180 hari. Kredit diragukan terjadi dalam hal debitur tidak dapat membayar angsuran pinjaman pokok dan/atau pembayaran bunga antara 181 hari sampai dengan 270 hari. Kredit macet terjadi bila debitur tidak mampu membayar berturut-turut setelah 270 hari.

4. Kredit Bermasalah (*Nonperforming Loan*)

a. Definisi Kredit Bermasalah (*Nonperforming Loan*)

Pemberian kredit tanpa analisis terlebih dahulu akan sangat membahayakan bank. Nasabah dalam hal ini ada kalanya memberikan data-data fiktif, sehingga mungkin saja kredit sebenarnya tidak layak, akan tetapi tetap diberikan. Kemudian apabila salah menganalisa, maka kredit yang disalurkan yang sebenarnya tidak layak menjadi layak sehingga akan berakibat sulit untuk ditagih atau macet (kredit bermasalah).

Kredit bermasalah yaitu kredit yang dalam pelaksanaannya belum mencapai/memenuhi target yang diinginkan oleh pihak bank kemudian memiliki kemungkinan timbulnya risiko kemudian hari bagi bank dalam arti luas, juga mengalami kesulitan dalam penyelesaian kewajiban-kewajiban baik dalam bentuk pembayaran kembali pokoknya dan atau pembayaran

bunga, denda keterlambatan serta ongkos-ongkos bank yang menjadi beban debitur yang bersangkutan. Menurut Tjoekam (1999:264) mengungkapkan bahwa:

“Kredit bermasalah adalah gambaran dari suatu kondisi kredit berupa principal, bunga, biaya-biaya, dan overdraft akan mengalami kegagalan karena tanda-tanda penyimpangan dibiarkan berakumulasi sehingga menurunkan mutu kredit dan cenderung menimbulkan kerugian potensial bagi bank.”

Menurut Siamat (2001:174) menjelaskan kredit bermasalah /problem loan dapat diartikan sebagai pinjaman yang mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya faktor kesengajaan dan atau karena faktor eksternal diluar kemampuan kendali debitur.

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia PSAK No.31 (2000), kredit bermasalah (*nonperforming loan*) pada umumnya merupakan kredit yang pembayaran angsuran pokoknya dan atau bunganya telah lewat 90 hari atau lebih setelah jatuh tempo, atau kredit yang pembayarannya secara tepat waktu sangat diragukan. Kredit *nonperforming* terdiri atas kredit yang digolongkan kurang lancar, diragukan, macet.

Jadi dapat disimpulkan, kredit bermasalah adalah suatu keadaan dimana nasabah sudah tidak sanggup membayar sebagian atas seluruh kewajibannya kepada bank seperti yang

telah diperjanjikan dan dapat menimbulkan kerugian potensial kepada bank.

b. Akuntansi Kredit Bermasalah (*Nonperforming Loan*)

Menurut Ismail (2010:224), akuntansi kredit bermasalah terdiri dari:

1) Pengakuan pendapatan bunga kredit *nonperforming*

Nonperforming loan terjadi bila debitur tidak membayar angsuran pinjaman pokok maupun bunga setelah 90 hari. Pendapatan bunga kredit untuk kredit *nonperforming* diakui atas dasar *cash basis*, yaitu pengakuan pendapatan kredit pada saat adanya pembayaran dari debitur. Pendapatan bunga kredit *nonperforming* diakui sebagai pendapatan bunga dalam penyelesaian yang tidak dicatat dalam laporan laba rugi akan tetapi dicatat dalam tagihan kontijensi.

2) Pembayaran kewajiban kredit *nonperforming*.

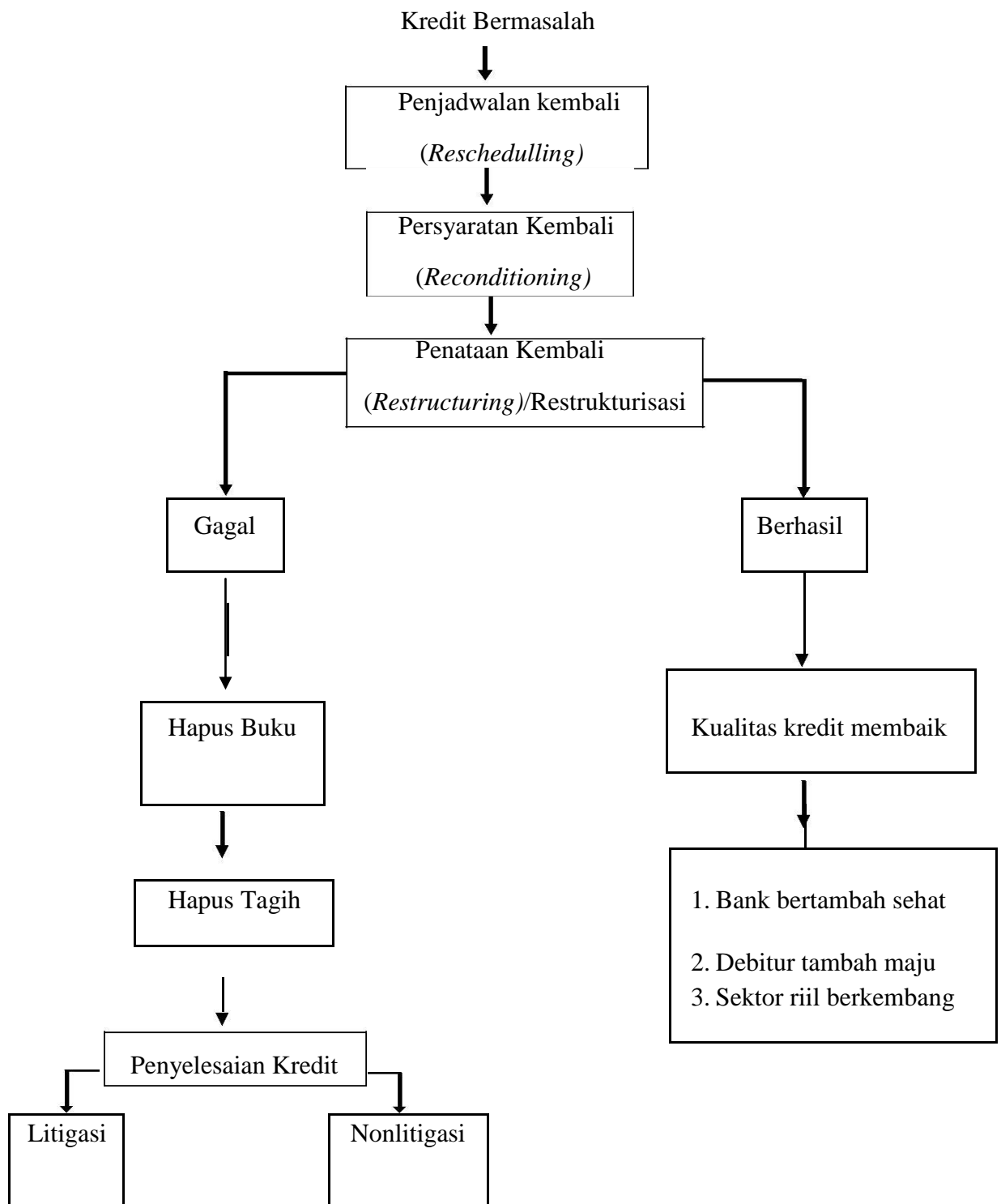
Dalam hal terdapat pembayaran kredit *nonperforming*, maka bila kredit termasuk golongan kredit kurang lancar, maka prioritas pembayarannya adalah pembayaran bunga, denda, dan lain-lain, kemudian sisanya digunakan untuk pembayaran pinjaman pokok. Golongan kredit diragukan dan kredit macet, prioritas pembayaran adalah untuk pembayaran pokok dan sisanya digunakan untuk pembayaran bunga, denda, dan biaya lainnya.

c. Penyelesaian Kredit Bermasalah (*Nonperforming Loan*)

Menurut Hariyani (2010:41), apabila penyelamatan kredit yang dilakukan oleh bank ternyata tidak berhasil, maka bank dapat melakukan tindakan lanjutan berupa penyelesaian kredit macet melalui program penghapusan kredit macet(*write-off*). Penghapusan kredit macet terbagi dalam dua tahap yaitu hapus buku atau penghapusan secara bersyarat atau *conditional write-off*, dan hapus tagih atau penghapusan secara mutlak atau *absolute write-off*.

Jika kemudian program hapus buku dan hapus tagih juga belum berhasil mengembalikan dana kredit yang disalurkan kepada debitur, maka bank dapat menyelesaikan portofolio kredit macet tersebut melalui jalur litigasi (proses peradilan) maupun jalur non-litigasi (diluar proses peradilan).

5. Struktur Penyeselaian Kredit Bermasalah.



Gambar.1

Sumber: Hariyani; Restrukturisasi dan Penghapusan Kredit Macet; 2010

B. Restrukturisasi Kredit

Restrukturisasi kredit diberikan kepada debitur yang tidak dapat memenuhi kewajibannya atau debitur yang diperkirakan tidak dapat memenuhi kewajiban pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga sesuai dengan jadwal yang diperjanjikan. Bank melakukan restrukturisasi kredit kepada debitur berdasarkan pertimbangan ekonomi dan hukum yang pemberiannya terbatas pada adanya kesulitan keuangan debitur sehingga perlu dibantu oleh bank dalam menyelesaikannya. Bank memiliki keyakinan bahwa dengan dilakukan restrukturisasi kredit kepada debitur, maka kondisi keuangan debitur akan menjadi lebih baik, sehingga kualitas kredit debitur meningkat.

Menurut PSAK No.55 (2000:34), kredit *nonperforming* yang telah direstrukturisasi, dengan cara memberi keringanan kepada peminjam yang sedang mengalami kesulitan keuangan, tetap diklasifikasikan sebagai *nonperforming* sampai dengan kredit tersebut menjadi *performing*, yaitu pada saat pembayaran pokok/bunga sudah dilakukan secara teratur selama jangka waktu tertentu.

Menurut Ismail (2010:228), restrukturisasi kredit dapat dilakukan dengan berbagai cara antara lain; modifikasi syarat-syarat kredit, penambahan fasilitas kredit, pengambilalihan agunan/aset, konversi kredit.

1. Modifikasi Persyaratan Kredit

Restrukturisasi kredit yang paling umum dilakukan oleh bank adalah dengan melakukan modifikasi persyaratan kredit. Persyaratan kredit

yang perlu diperbaharui dalam rangka restrukturisasi adalah penurunan sukubunga kredit, perpanjangan jangka waktu kredit, pengurangan tunggakan bunga kredit, pengurangan jumlah pokok kredit. Dengan melakukan kombinasi atas perubahan persyaratan kredit, diharapkan kondisi keuangan debitur menjadi lebih baik dan pada akhirnya debitur mampu memenuhi kewajiban pembayaran pokok kredit maupun bunga. Menurut Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia (2001), perhitungan nilai tunai penerimaan kas masa depan dan kerugian restrukturisasi kredit yang dilakukan dengan mengubah/memodifikasi persyaratan kredit adalah sebagai berikut:

- a. Bila nilai tunai penerimaan kas masa depan yang ditentukan dalam persyaratan baru sama dengan nilai tercatat kredit, maka bank mencatat dampak restrukturisasi secara prospektif, dan tidak mengubah nilai tercatat kredit pada tanggal restrukturisasi karena bank tidak mengalami kerugian restrukturisasi.
- b. Bila nilai tunai penerimaan kas masa depan yang ditentukan dalam persyaratan baru lebih kecil dari nilai tercatat kredit maka bank mengakui kerugian restrukturisasi sebesar selisih antara nilai tercatat kredit dengan nilai tunai penerimaan pokok dan bunga.
- c. Faktor pendiskonto yang digunakan dalam perhitungan nilai tunai penerimaan kas masa depan atas kredit yang direstrukturisasi adalah tingkat suku bunga pasar, yaitu tingkat

bunga efektif dari kredit sebelum direstrukturisasi. Tingkat bunga tersebut dilakukan evaluasi secara triwulanan sesuai dengan tingkat bunga pasar.

- d. Dalam penentuan kerugian restrukturisasi, jumlah pembayaran kontingen dari debitur (misalnya peningkatan pembayaran angsuran dimasa depan sesuai dengan perbaikan usaha debitur) dapat diperhitungkan sebagai bagian dari nilai tunai penerimaan kas masa depan, hanya jika jumlah kontingen tersebut lebih besar kemungkinannya untuk dapat direalisasi (*probable*) dan jumlahnya dapat ditentukan secara wajar serta telah diperjanjikan sebelumnya.

Restrukturisasi kredit dengan pengurangan pokok dan/atau bunga, maka selain perhitungan nilai tunai penerimaan kas masa depan dan kerugian restrukturisasi kredit perlu juga diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Pengurangan pokok dan/atau bunga secara absolut, maka pengurangan pokok kredit dibebankan ke penyisihan kerugian kredit. Pengurangan bunga dilakukan dengan melakukan jurnal balik atas tagihan kontijensi dan tidak mengakui kerugian.
- b. Pengurangan pokok dan/atau bunga secara kontijen/bersyarat, pengurangan pokok kredit dibebankan ke penyisihan kerugian kredit dan bank mengakui tagihan kontijensi pokok.

Pengurangan bunga dilakukan dengan melakukan jurnal balik atas tagihan kontijensi dan bank tidak mengakui kerugian.

2. Penambahan Fasilitas Kredit

Dalam kasus tertentu, debitur bermasalah justru akan mendapat tambahan kredit dengan tujuan agar usahanya menjadi lancar dan dapat mengembalikan kewajibannya. Tambahan kredit ini diberikan untuk debitur yang memperoleh kredit investasi dan/atau kredit modal kerja. Misalnya usaha debitur tidak dapat berjalan bila tidak diikuti dengan investasi peralatan baru atau ditambah modal kerja. Bank dapat memberikan tambahan kredit untuk investasi dan/atau modal kerja.

3. Pengambilalihan Agunan/Aset Debitur

Pengambilalihan agunan kredit/aset debitur dilakukan bila debitur sudah tidak sanggup membayar kewajibannya dengan menyerahkan agunannya. Agunan yang dimiliki oleh bank adalah berupa surat/bukti kepemilikan, sementara fisik aset yang digunakan masih dikuasai oleh debitur. Dalam hal penguasaan bisa dilakukan bila debitur kooperatif dan ikut membantu menyelesaikan kreditnya. Restrukturisasi kredit dengan pengambilalihan agunan/aset debitur dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Agunan kredit atau aset lain yang diambil alih seperti tanah, bangunan, dan surat berharga diakui sebesar nilai bersih yang dapat direalisasi, yaitu nilai wajar agunan/aset setelah dikurangi estimasi biaya untuk menjual agunan/aset tersebut.

- b. Sisa kredit setelah dikurangi nilai bersih agunan/aset lain yang diambil alih merupakan kredit yang direstrukturisasi yang perlakuannya sebagaimana diatur dalam restrukturisasi dengan modifikasi persyaratan.

4. Konversi Kredit

Konversi kredit merupakan konversi pinjaman dalam bentuk penyertaan modal pada perusahaan debitur. Dengan dilakukannya konversi kredit, maka *outstanding* kredit debitur yang telah dikonversi dikurangkan dari akun kredit. Konversi kredit dilakukan dengan mendapat saham perusahaan debitur.

Dalam hal saham yang diserahkan nilainya lebih rendah dibanding total kewajibannya, maka sisanya masih menjadi kredit debitur. Sebaliknya bila nilai wajar saham lebih tinggi dibanding dengan total kewajiban debitur, maka selisihnya dicatat sebagai pendapatan yang ditangguhkan.

C. Penelitian yang Relevan

1. Penelitian yang dilakukan oleh Gunawan Zakariah (2011) dengan judul “Analisis Perlakuan Untuk Kredit Bermasalah (*nonperforming loan*) sesuai PSAK No.31 pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Di Unit Regional Credit Recovery Makasar”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kapan munculnya nilai kredit bermasalah, setelah itu membandingkan perlakuan akuntansi pada PT. Bank Mandiri untuk *nonperforming Loan* dengan PSAK No. 31 tentang Akuntansi Perbankan dan untuk memberikan pemahaman tentang metode akuntansi apa yang

diterapkan PT. Bank Mandiri untuk mengatasi *nonperforming loan*. Metode pengumpulan data yang digunakan dengan metode penelitian kepustakaan dan metode penelitian lapangan. Berdasarkan data-data yang diperoleh, kesimpulan hasil penelitian Adela perlakuan akuntansi yang diterapkan oleh Bank Mandiri untuk kredit bermasalah (*nonperforming loan*) tidak sesuai dengan SAK dimana kredit tersebut menggunakan *current cost*, sedangkan dalam PSAK No.31 mengukur dengan menggunakan *historical cost* dan untuk pelaporan keuangan 2010 terjadi perubahan khususnya dalam hal laporan dan penyajian kredit bermasalah seiring dicabutnya penerapan PSAK No. 31 diganti dengan penerapan PSAK 50 (Revisi 2006) dan 55 (Revisi 2006) yang berdampak pada munculnya penurunan nilai aset. Persamaan penelitian relevan dengan penelitian ini adalah dalam metode pengumpulan data. Perbedaan penelitian ini adalah pada penelitian ini bertujuan untuk membandingkan kesesuaian antara perlakuan akuntansi yang diterapkan oleh PT.Bank Negara Indonesia (Persero) terhadap kredit bermasalah (*nonperforming loan*) dan pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 31 sebelum dan sesudah efektif dicabut. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah dengan metode penelitian kepustakaan dan metode penelitian lapangan. Laporan Keuangan perbankan Indonesia mengacu pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 50 (Revisi 2006) “Instrumen Keuangan : Penyajian dan Pengungkapan”, serta Pernyataan Standar Akuntansi

Keuangan No.55 (Revisi 2006) “, selain itu perbedaan juga pada Objek penelitian dan metode analisis data.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Rifki Rafsanjani (2012) dengan judul “Perlakuan Akuntansi Kredit Bermasalah (*nonperforming loan*) setelah pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 31 Efektif dicabut Pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.” Penelitian ini bertujuan untuk memfokuskan pada perlakuan akuntansi kredit bermasalah pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) setelah PSAK No. 31 Efektif dicabut, kemudian menganalisis kesesuaiannya dengan PSAK No. 50 (Revisi 2010) Instrumen keuangan : Penyajian, PSAK No. 55 (Revisi 2011) Instrumen keuangan : Pengungkapan. Perbedaan penelitian ini adalah peneliti membandingkan kesesuaian antara perlakuan akuntansi yang diterapkan oleh PT. Bank Negara Indonesia (Persero) terhadap Kredit Bermasalah (*nonperforming Loan*) dengan pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No.31sebelum dan sesudah efektif dicabut, selain itu juga perbedaan pada Objek penelitian.

D. Kerangka Berfikir

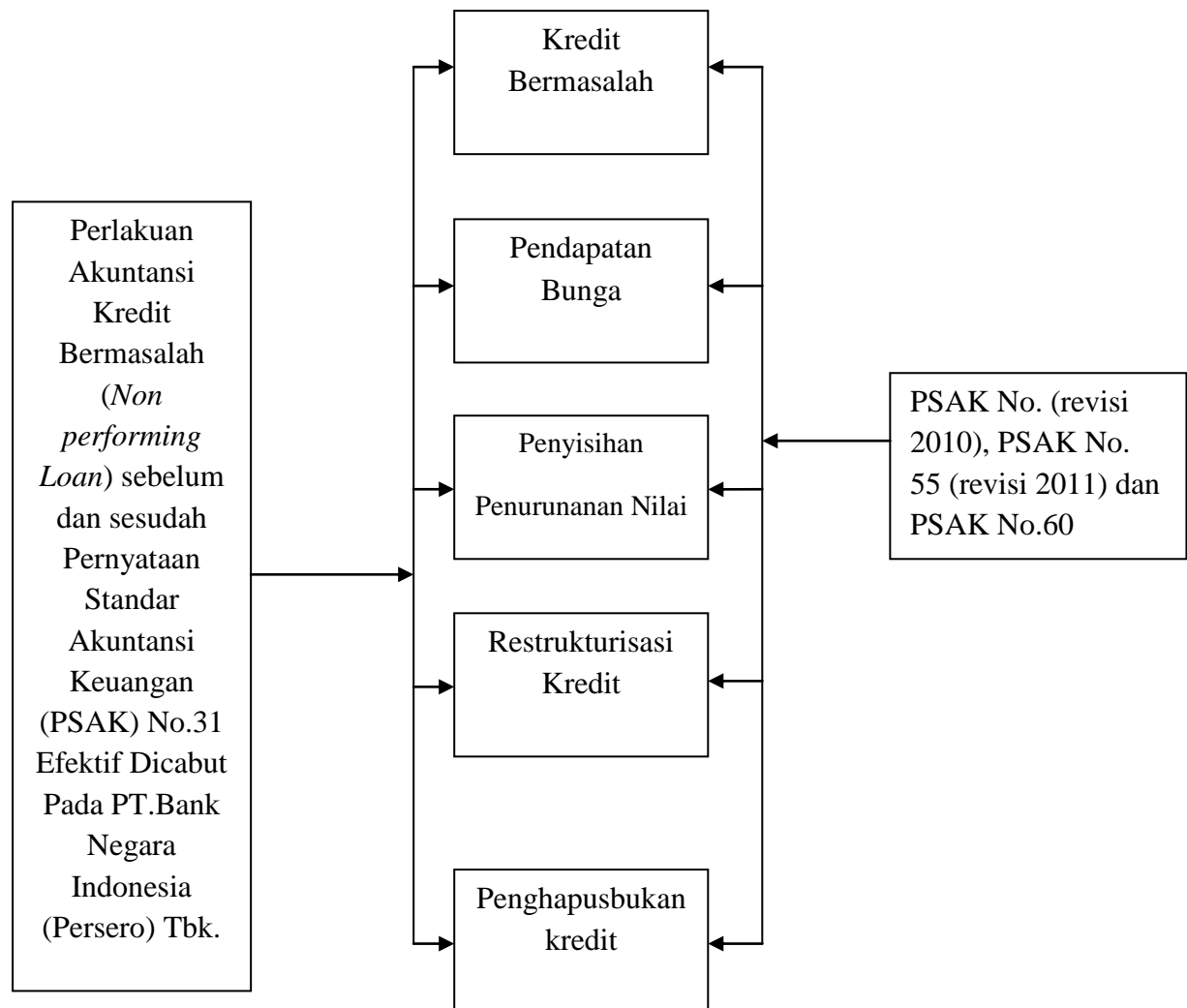
kredit bermasalah adalah dimana debitur mengingkari janji mereka membayar bunga dan kredit induk yang telah jatuh tempo, sehingga terjadi keterlambatan pembayaran atau sama sekali tidak ada pembayaran. Didalam peraturan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) perlakuan tentang kredit bermasalah ini diatur dalam PSAK No. 31 tentang Akuntansi Perbankan. PSAK No. 31 adalah standar Akuntansi khusus atau pedoman yang mengatur

tentang akuntansi perbankan. Penerapan PSAK No. 31 yaitu tentang penyusunan laporan keuangan atau pelapora keuangan, penerapan aktiva, penerapan kewajiban, penerapan ekuitas dan penerapan pendapatan dan beban dimaksudkan agar kualitas informasi laporan keuangan yang disajikan akan lebih terjaga akuntabilitasnya serta lebih handal dan relevan. Selain itu diharapkan informasi keuangan yang disajikan tidak menyesatkan penggunaannya dan akan mendorong ketepatan dalam pengambilan keputusan yang nantinya berpengaruh terhadap perkembangan perbankan tersebut. Jadi apabila sebuah bank dalam praktiknya tidak disesuaikan dengan standar akuntansi atau PSAK No.31 maka laporan keuangan yang disajikan juga akan menurun tingkat relevansinya dan tidak dapat diperbandingkan serta diragukan tingkat keandalannya.

Namun karena dampak dari konvergensi ke standar akuntansi internasional (*International Financing Reporting Standard* atau IFRS) mengakibatkan perlunya pencabutan terhadap Pernyataan Akuntansi Keuangan No. 31 Revisi 2000 Akuntansi Perbankan. Sebagai gantinya bank diwajibkan menerapkan : 1. PSAK No. 50 (Revisi 2010) mengenai Instrumen Keuangan: Penyajian.; 2. PSAK No. 55 (Revisi 2011) mengenai Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran; dan 3. PSAK No.60 mengenai Instrumen Keuangan: Pengungkapan. Dengan diberlakukannya ketiga PSAK tersebut tentu akan mengakibatkan perubahan dalam memperlakukan kredit, oleh karena itu perlu dilakukan sosialisasi dan pengawasan mengingat

konvergensi ini pada awalnya baur dilakukan pada sektor perbankan Indonesia.

E. Paradigma Penelitian



Gambar. 2

Paradigma penelitian pada PT. Bank Negara Indonesia

F. Pertanyaan Penelitian

1. Berapa jumlah kredit yang diberikan pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk periode 2009-2011?
2. Berapa jumlah kredit yang diberikan pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk periode 2009-2011 berdasarkan kolektibilitasnya?
3. Berapa jumlah kredit bermasalah pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk periode 2009-2011 ?
4. Berapa rasio *non performing loan* pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk periode 2009-2011 ?
5. Bagaimana PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk menggolongkan atau mengkategorikan kredit berdasarkan tunggakan angsuran ?
6. Bagaimana perlakuan (pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan) kredit yang diberikan pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Sebelum dan sesudah pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 31 Efektif dicabut?
7. Bagaimana perlakuan (pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan) pendapatan bunga atas kredit yang diberikan pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Sebelum dan sesudah pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 31 Efektif dicabut?

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data yang berhubungan dengan penulisan ini dilakukan penelitian yang bertempat pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Wilayah Yogyakarta yang dilaksanakan pada bulan Oktober 2014 di PT. Bank Negara Indonesia (Persero) cabang Yogyakarta Jalan Kaliurang No.4 Bulak sumur Yogyakarta.

B. Metode Pengumpulan Data

1. Dokumentasi

Yaitu pengumpulan data dan informasi lainnya dari berbagai literatur, buku-buku dan teori yang berhubungan dengan masalah yang dibahas pada penelitian ini. Hal tersebut dimaksudkan sebagai sumber acuan untuk membahas teori yang mendasari pembahasan masalah dan analisis data dalam penelitian ini, serta menelaah penelitian ini.

2. Metode Wawancara

Penelitian ini dilakukan dengan mengadakan pengamatan langsung dan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dengan PT. Bank Negara Indonesia khususnya divisi kredit dan divisi akuntansi.

C. Jenis Data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a) Data kualitatif, yaitu data yang terdiri dari kumpulan data non angka yang sifatnya deskriptif yang terdiri dari:

- 1) Gambaran umum perusahaan, struktur organisasi, dan sebagainya.
 - 2) Buku pedoman perusahaan yang berisi pelaksanaan perlakuan akuntansi dan pelaksanaan proses pemberian kredit pada tempat penelitian.
 - 3) Peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia yang ditetapkan oleh BNI, yaitu Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia (PAPI).
- b) Data kuantitatif, yaitu data berupa angka-angka yang diperoleh dari laporan keuangan tahun yang telah diaudit selama periode 2009-2010.
- c) Data sekunder.

Data yang diperoleh langsung dari perusahaan /instansi terkait melalui hasil wawancara dengan pihak karyawan BNI yang bertugas pada divisi kredit khususnya yang menangani masalah kredit bermasalah dan hapus buku, divisi *Commercial* dan *recovery* data *Resource Management* (RRM). Data yang diperoleh dari sumber di luar bank, yaitu Bank Indonesia dalam bentuk literatur-literatur akuntansi perbankan yang berhubungan dengan penelitian ini. Situs resmi Bank Indonesia yaitu www.bi.go.id.

D. Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah metode deskriptif dan komparatif dimana akan dipaparkan metode

perlakuan akuntansi atas kredit bermasalah yang diterapkan oleh PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. sebelum Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 31 revisi 2000 tentang Akuntansi Perbankan dicabut dan setelah Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 31 revisi 2000 efektif dicabut pada tanggal 1 Januari dan digantikan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 50 tentang Instrumen Keuangan: Penyajian dan Pengungkapan dan No. 55 revisi 2006 tentang Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Hasil Penelitian

Data Umum

a. Sejarah Berdirinya Bank Negara Indonesia

Berdiri sejak 1946, BNI yang dahulu dikenal sebagai Bank Negara Indonesia, merupakan bank pertama yang didirikan dan dimiliki oleh Pemerintah Indonesia. Awal berdirinya PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kelahiran Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini dikarenakan peresmian PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk dilaksanakan pada hari ulang tahun pertama proklamasi kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus 1946. Upacara peresmian dilakukan oleh Wakil Presiden Mohammad Hatta yang berlangsung di bekas gedung *De Javascha Bank*, Yogyakarta.

Pemerintah kemudian membentuk jajaran direksi yang meliputi :

- 1) R.M. Djojohadikoesoema sebagai Presiden Direktur.
- 2) T.R.B. Sabaroeddin sebagai Direktur I (Wakil Presiden Direktur)
- 3) Mr. Soekarno sebagai Direktur II.
- 4) Mr. A. Karim sebagai Sekertaris Direksi

Sesungguhnya Bank Negara Indonesia yang dibentuk tahun 1946 itu adalah "Penjelmaan" dari Pesat Bank Indonesia. Sejak awal berdirinya Bank Negara Indonesia telah diberi tugas sebagai bank sirkulasi/bank sentral yang memiliki hal tunggal untuk mengatur pengeluaran dan peredaran uang dalam batas-batas wilayah kekuasaan Republik Indonesia. Hal ini berarti Bank Negara Indonesia memiliki kedaulatan dalam bidang perbankan nasional di wilayah hukumnya.

Bank Negara Indonesia mulai mengedarkan alat pembayaran resmi pertama yang dikeluarkan Pemerintah Indonesia, yakni ORI atau Oeang Republik Indonesia, pada malam menjelang tanggal 30 Oktober 1946, hanya beberapa bulan sejak pembentukannya. Hingga kini, tanggal tersebut diperingati sebagai Hari Keuangan Nasional, sementara hari pendiriannya yang jatuh pada tanggal 5 Juli ditetapkan sebagai Hari Bank Nasional.

Menyusul penunjukkan *De Javasche Bank* yang merupakan warisan dari Pemerintah Belanda sebagai Bank Sentral pada tahun 1949, Pemerinrah membatasi peranan Bank Negara Indonesia sebagai bank sirkulasi atau bank sentral. Bank Negara Indonesia lalu ditetapkan sebagai bank pembangunan, dan kemudian diberikan hak untuk bertindak sebagai bank devisa, dengan akses langsung untuk transaksi luar negeri.

Penegasan status Bank Negara Indonesia sebagai bank umum secara yuridis baru ditetapkan tanggal 4 Februari 1956 yaitu dengan dikeluarkannya Undang-undang darurat No. 2 tahun 1955 tentang Bank Negara Indonesia. Dengan dikeluarkannya undang-undang ini, tugas dan lapangan usaha Bank Negara Indonesia secara tercantum dalam pasal 6 adalah membantu memajukan kemakmuran rakyat dan pembangunan perekonomian nasional dalam lapangan perdagangan pada umumnya dan lapangan perdagangan ekspor-impor pada khususnya. Undang-undang ini juga menetapkan peningkatan modal Bank Negara Indonesia dari Rp. 100 juta menjadi Rp. 300 juta.

Usaha yang dilakukan oleh Bank Negara Indonesia sehubungan dengan status hukumnya sebagai bank komersial (Bank Umum) milik pemerintah antara lain adalah menyelenggarakan perkreditan jangka panjang, memberikan kredit bagi golongan pedagang pada umumnya, dan khususnya bagi golongan importer dan eksportir, menerima uang sebagai simpanan giro dan deposito, memperdagangkan surat-surat berharga serta dengan izin pemerintah, Bank Negara Indonesia boleh turut serta dalam modal perusahaan manapun juga.

Berdasarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang No. 2 tanggal 5 Juli 1946, maka Pusat Bank Indonesia dileburkan ke dalam Bank Negara Indonesia. Dalam peleburan ini

maka cabang-cabang Pusat Bank Indonesia di Surakarta, Kediri, Malang, dan Jakarta secara otomatis sebagai kantor cabang Bank Negara Indonesia.

Setelah fungsinya dibatasi sebagai bank sirkulasi pada tanggal 15 September 1950, pemerintah memberikan hak kepada bank Indonesia untuk menjadi bank devisa melalui ketetapan dari Lembaga Alat-alat Luar Negeri kegiatan perekonomian Indonesia pada waktu itu salah satunya bertumpu pada sektor hasil perkebunan. Sebagai bank devisa, selanjutnya Bank Negara Indonesia dapat mengadakan hubungan atau transaksi dengan luar negeri tanpa harus melalui *De Javascha Bank*. Perkembangan ekspor-impor baik antar pulau maupun antar Negara terus meningkat yang harus diantisipasi dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, konsepsi “*Go Internasional*” pada dasawarsa 1950-an bagi Bank Negara Indonesia bertujuan untuk mengalkan aktivitas ekspor-impor serta mengundang masuknya investor asing ke Indonesia melalui kegiatan pasar modal maupun perbankan.

Pengertian “*Go Internasional*” pada saat ini memiliki dimensi dan pengertian yang lebih luas dibandingkan dengan pengertian “*Go Internasional*” pada tahun 1950-an. Namun demikian, kebijakan untuk “*Go Internasional*” itu sendiri sudah

tercermin sejak Bank Negara Indonesia memperoleh status Bank Devisa.

Sehubungan dengan penambahan modal pada tahun 1955, status Bank Negara Indonesia diubah menjadi bank komersil milik pemerintah. Perubahan ini melandasi pelayanan yang lebih baik dan luas bagi sektor usaha nasional.

Sejalan dengan keputusan penggunaan tahun pendirian sebagai bagian dari identitas perusahaan, nama Bank Negara Indonesia 1946 resmi digunakan mulai akhir tahun 1968. Perubahan ini menjadikan Bank Negara Indonesia lebih dikenal sebagai “BNI 46”. Penggunaan nama panggilan yang lebih mudah diingat “Bank BNI”, ditetapkan bersamaan dengan perubahan identitas perusahaan tahun 1988.

Tahun 1992, status hukum dan nama BNI berubah menjadi PT. Bank Negara Indonesia (Persero), sementara keputusan untuk menjadi perusahaan public diwujudkan melalui penawaran saham perdana di pasar modal pada tahun 1996.

Kemampuan BNI untuk beradaptasi terhadap perubahan dan kemajuan lingkungan, sosial-budaya serta teknologi dicerminkan melalui penyempurnaan identitas perusahaan yang berkelanjutan dari masa ke masa. Hal ini juga menegaskan dedikasi dan komitmen BNI terhadap perbaikan kualitas kinerja secara terus menerus.

Pada tahun 2004, identitas perusahaan yang diperbaharui mulai digunakan untuk menciptakan suatu identitas yang tampak lebih segar, lebih modern, lebih dinamis, serta menggambarkan prospek masa depan yang baik, setelah keberhasilan mengarungi masa-masa yang sulit. Identitas tersebut merupakan perwujudan brand baru yang tersusun dari angka “46” dan huruf “BNI”. Kedua bagian tersebut selanjutnya dikombinasikan dalam suatu logo baru BNI.

Huruf BNI di buat dalam nuansa *turquoise*, namun agar berbeda dengan sebelumnya. Hal ini untuk mencerminkan kekuatan, otoritas, kekukuhan, keunikan dan citra yang lebih modern. Sedangkan huruf “BNI” dibuat secara khusus untuk menghasilkan struktur yang orisinal.

Angka “46” sekaligus mencerminkan kebanggaan sebagai warisan bank pertama di Republik Indonesia. Dalam logo ini, angka “46” diletakkan secara diagonal dari kiri bawah ke kanan atas, menembus kotak warna jingga. Disain ini untuk menggambarkan BNI baru lebih model.

Warna korporat telah didesain ulang, namun tetap mempertahankan warna korporat yang lama yakni *turquoise* dan jingga. Warna *turquoise* digunakan pada logo baru ini lebih gelap, lebih kuat/tegas mencerminkan citra yang lebih stabil dan kokoh.

Sementara warna jingga yang baru lebih cerah dan kuat, mencerminkan citra yang lebih percaya diri dan segar.

Logo “46” dan “BNI” mencerminkan tampilan yang modern dan dinamis. Sedangkan penggunaan warna korporat baru memperkuat identitas tersebut. Hal ini akan membantu BNI melakukan diferensiasi di pasar perbankan melalui identitas yang unik, segar dan modern.

Dalam upaya menghadapi berbagai tantangan, BNI melakukan *self-evaluation* secara menyeluruh dan merumuskan berbagai program pemulihan dan perbaikan di semua sektor, serta fungsi dari perusahaan yang selanjutnya disebut peta navigasi BNI 2004.

b. Visi, Misi, dan Nilai Dasar Bank Negara Indonesia

Dalam peta navigasi ini, dijabarkan berbagai langkah strategi yang telah dan akan dilaksanakan dalam tiga tahapan utama, yaitu tahapan stabilitasi tahap pemulihan, dan tahap transformasi. Sesuai dengan komitmen manajemen membangun BNI yang lebih baik, telah dilakukan redefinisi visi dan misi BNI, yaitu :

1) Visi

Menjadi bank kebanggaan nasional yang unggul, terkemuka dan terdepan dalam layanan dan kinerja. Pernyataan Visi
Menjadi bank kebanggaan nasional, yang menawarkan

layanan terbaik dengan harga yang kompetitif kepada segmen pasar korporasi, komersial dan konsumen.

2) Misi

- a) Memberikan layanan prima dan solusi yang bernilai tambah kepada seluruh nasabah dan selaku mitra pilihan utama (*the bank choise*).
- b) Meningkatkan nilai investasi yang unggul bagi investor.
- c) Menciptakan kondisi terbaik sebagai tempat kebanggaan untuk berkarya dan berprestasi.
- d) Meningkatkan kepedulian dan tanggungjawab terhadap lingkungan sosial.
- e) Menjadi acuan pelaksanaan kepatuhan dan tata kelola perusahaan yang baik.

3) Nilai

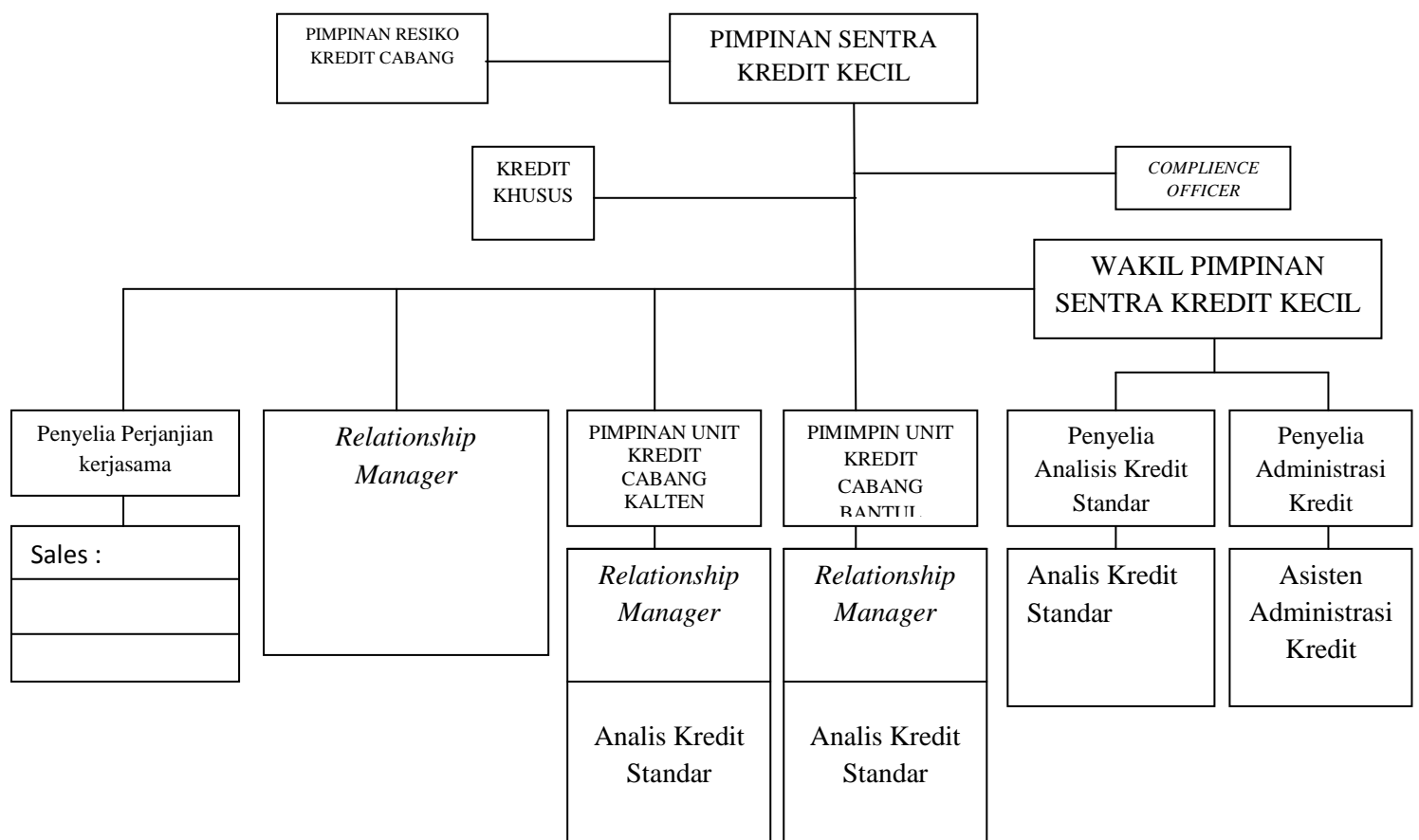
Kenyamanan dan kepuasan.

4) Motto

Melayani dengan kebanggaan sebagai bank anak negeri (Jangka Pendek).

c. Struktur Organisasi PT. Bank Negara Indonesia (Persero)

sentra kredit kecil cabang Yogyakarta



Gambar.3

Sumber : PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

d. Job Description masing-masing bagian

Untuk lebih meningkatkan kegiatan usaha BNI secara tertib dan lebih lancar serta berada pada tingkat daya guna dan hasil guna yang optimal, maka ditetapkan uraian tugas (*job description*) kantor cabang PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk adalah sebagai berikut :

1) Pemimpin Kantor Wilayah

- a) Menetapkan rencana kerja dan anggaran, sasaran usaha dan tujuan yang akan dicapai oleh kantor wilayah.
- b) Mengelola, mengarahkan, mengembangkan dan memajukan bisnis kantor wilayah.
- c) Mengelola dan mengembangkan SDM wilayah menjadi tenaga kerja yang handal dan profesional.
- d) Membina dan mengarahkan peningkatan profitabilitas, kesehatan, kapabilitas, dan kinerja cabang-cabang.
- e) Menunjang kebijakan dan strategi BNI secara keseluruhan dan pelaksanaannya pada tingkat wilayah.
- f) Memasarkan produk dan jasa-jasa BNI dalam rangka meningkatkan bisnis dan menguasai pangsa pasar di daerah kerjanya.
- g) Berperan sebagai CEO dalam skala regional dalam menjalankan fungsi koordinasi dengan unit organisasi yang berada di lingkungan wilayah kerjanya.

2) Wakil Pimpinan Kantor Wilayah

- a) Mengelola dan mengembangkan bisnis cabang yang berada di bawah supervisinya.
- b) Membina, membimbing dan memberikan petunjuk untuk meningkatkan pertumbuhan, profitabilitas, kesehatan dan performace cabang.
- c) Membantu cabang dalam upaya meningkatkan dana, fee based income dan penanganan nasabah.
- d) Membimbing dan membantu cabang dalam melaksanakan strategi pengelolaan layanan dicabang.
- e) Membimbing dan membantu cabang dalam implementasi business plan cabang.
- f) Membantu cabang dalam pengelolaan dan pengembangan SDM cabang guna meningkatkan kualitas dan profesionalisme.
- g) Melaksanakan pengendalian manajemen operasional di cabang secara efektif dan kontinue.

3) Pemimpin Kelompok Penunjang Bisnis dan Layanan

- a) Menyelia, mengkoordinir dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan penyusunan program, penyediaan sarana dan kelengkapan, dan mengelola penugasan terhadap program/proyek khusus dan tugas lainnya.
- b) Menyelia (mengarahkan, mengendalikan dan mengawasi) secara langsung unit-unit kerja menurut bidang tugasnya (pengelolaan bisnis/layanan), pengembangan dan pengeloa administrasinya sejalan dengan sistem dan

prosedur yang berlaku dengan koordinasi unit di lingkungan kantor wilayah agar didapatkan sinergi yang optimal.

- c) Memasarkan produk dan jasa-jasa BNI kepada nasabah serta menggali calon nasabah yang potensial dalam rangka meningkatkan bisnis dan menguasai pangsa pasar yang regional di daerah kerjanya.
- d) Mendukung dan memberi masukan kepada pemimpin dan wakil pemimpin dalam menjalankan fungsinya antara lain : menyediakan data/informasi, persaingan usaha, pencapaian bisnis cabang dan sentra kerja.

4) Pemimpin Kelompok Penunjang Operasional

- a) Mengelola penyeliaan, koordinasi dan melaksanakan pengelolaan di bidang SDM, perencanaan keuangan, hukum teknologi dan logistik daerah.
- b) Melakukan koordinasi antar segenap unit wilayah sehingga dapat dihasilkan sinergi kerja yang optimal.
- c) Membantu pemimpin wilayah dalam mengarahkan kelancaran aktivitas dan pengembangan operasional wilayah dan cabang.

5) Pengelola Bisnis

- a) Mengelola strategi pencapaian target bisnis cabang.
- b) Melaksanakan kebijakan produk DN/LN dan perkreditan.
- c) Mengelola pelaksanaan program pemasaran bisnis di cabang.
- d) Memelihara hubungan dengan mitra pemasaran bisnis di cabang.
- e) Memelihara hubungan dengan mitra bisnis regional.

6) Pengelola Layanan

- a) Merumuskan program peningkatan kualitas layanan.
- b) Melaksanakan evaluasi pencapaian standar service level layanan.
- c) Mengendalikan kualitas implementasi pelayanan di cabang.

7) Pengelola Sumber Daya Manusia

- a) Menyusun perencanaan sumber daya manusia untuk wilayah cabang.
- b) Mengelola pelaksanaan sistem kebijakan kepegawaian di wilayah cabang.
- c) Mengelola pelaksanaan program pelatihan dan pengembangan pegawai.
- d) Mengkoordinir pelaksanaan budaya kerja dan gugus kendali mutu.
- e) Melakukan penyidikan kasus-kasus kecurangan, penipuan/pemalsuan atau penyimpangan lainnya yang menyangkut pegawai.

8) Pengelola Perencanaan dan Keuangan

- a) Mengelola penyusunan RKA/business plan.
- b) Mengelola data/informasi untuk keperluan internal (wilayah/cabang)
- c) Mengelola pelaksanaan evaluasi performance wilayah dan cabang.
- d) Menyusun riset/penelitian pasar regional.
- e) Mengkoordinasikan pelaksanaan pinjaman Two Step Loan, di masing-masing wilayah.

9) Pengelola Hukum

- a) Memberikan layanan konsultan hukum (kredit dan non kredit)
- b) Mengelola penyelesaian hukum (kredit dan non kredit)
- c) Mengelola sistem pengamanan/penerbitan asset BNI
- d) Mengelola administrasi kredit menengah.

10) Pengelola Teknologi dan Logistik

- a) Mengelola pelaksanaan sistem aplikasi transaksi produk dan jasa BNI di cabang.
- b) Mengelola optimalisasi asset dan properti di wilayah dan cabang.
- c) Mengelola keperluan logistik (premises) di wilayah dan cabang.
- d) Mengelola lokasi dan pelaksanaan penyimpanan arsip, voucher dan dokumen lainnya.

11) Pemimpin Bagian Umum

- a) Mengelola masalah kepegawaian, logistik, administrasi umum kantor wilayah dan sentra kredit.
- b) Melaksanakan pengamanan properti, perlengkapan dan fasilitas kantor.
- c) Mengkompilasi laporan tidak lanjut hasil temua audit.

12) Analis (Bisnis)

- a) Merumuskan strategi pencapaian target bisnis cabang.
- b) Melaksanakan kebijakan produk DN/LN dan perkreditan.
- c) Melaksanakan program pemasaran bisnis cabang.
- d) Memelihara hubungan dengan mitra bisnis regional.

13) Analis (SDM)

- a) Menganalisa dan menyusun perencanaan sumber daya manusia untuk wilayah dan cabang.
- b) Menganalisa dan melaksanakan sistem kebijakan kepegawaian di wilayah dan cabang.
- c) Menyiapkan program pelatihan dan pengembangan pegawai.

- d) Mengkoordinir pelaksanaan budaya kerja dan gugus kendali mutu.
- e) Melakukan penyelidikan kasus-kasus kecurangan, penipuan/ pemalsuan atau penyimpangan lainnya yang menyangkut pegawai.

14) Analis (Perencanaan dan Keuangan)

- a) Mengumpulkan data, menganalisa dan menyusun RKA/business plan.
- b) Mengumpulkan, menganalisa dan menyusun data/informasi untuk keperluan internal (wilayah/cabang).
- c) Mengumpulkan dan menganalisa serta mengevaluasi performance wilayah dan cabang.
- d) Menyusun riset penelitian pasar regional.
- e) Mengkoordinir pelaksanaan pinjaman Two Step Loan.

15) Yurist (Pengelola Hukum)

- a) Memberikan layanan konsultan hukum (kredit dan non kredit)
- b) Menganalisa kasus dan upaya penyelesaian hukum (kredit dan non kredit)
- c) Melaksanakan administrasi kredit menengah.

e. Produk-produk PT. Bank Negara Indonesia (Persero)

1) Kredit Modal Kerja

Kemudahan dari Kredit Modal Kerja BNI :

- a) Dapat dipergunakan untuk berbagai kebutuhan antara lain KMK untuk Industri, KMK untuk Jasa Pengangkutan, KMK Jasa Perhotelan, KMK Konstruksi dll
- b) Suku bunga bersaing.

- c) Kemudahan pencairan kredit dan transaksi lainnya dengan didukung jaringan BNI tersebar di seluruh Indonesia

Persyaratan :

- a) Kelengkapan Ijin/Legalitas usaha yang masih berlaku sesuai dengan bidang usahanya.
- b) Usaha telah berjalan minimal 2 (dua) tahun (untuk segmen menengah dan korporasi minimal 3 tahun).

2) Kredit investasi

Kemudahan dari Kredit Investasi BNI adalah :

- a) Dapat dipergunakan untuk panjang untuk pembelian barang-barang modal beserta jasa yang diperlukan untuk pendirian proyek baru, ekspansi proyek yang sudah ada, modernisasi, rehabilitasi, relokasi proyek atau refinancing atas obyek yang telah dibiayai terlebih dahulu.
- b) Jangka waktu kredit bisa disesuaikan dengan kemampuan usaha nasabah
- c) Suku bunga bersaing.
- d) Kemudahan pencairan kredit dan transaksi lainnya dengan didukung jaringan BNI tersebar di seluruh Indonesia

Persyaratan :

- a) Kelengkapan Ijin/Legalitas usaha yang masih berlaku sesuai dengan bidang usahanya.

- b) Usaha telah berjalan minimal 2 (dua) tahun (untuk segmen menengah dan korporasi minimal 3 tahun).

3) Kredit *Supply Chain*

Kredit *Supply Chain* (*Supply Chain Financing*) adalah fasilitas kredit yang diberikan kepada Mitra Usaha (*supplier/buyer/kontraktor*) dari Nasabah-nasabah utama BNI.

Kemudahan :

- a) Suku bunga yang lebih bersaing dan persyaratan kredit yang lebih fleksibel.
- b) Fasilitas bersifat customized sesuai kebutuhan terkait supply chain.
- c) Jaringan BNI tersebar di seluruh Indonesia
- d) Proses kredit relatif lebih cepat.

Persyaratan :

- a) Kelengkapan ijin / legalitas usaha yang masih berlaku sesuai dengan bidang usahanya.
- b) Usaha telah berjalan minimal 2 (dua) tahun.

4) Kredit Lembaga Keuangan

Kredit kepada Lembaga Keuangan adalah fasilitas kredit yang diberikan kepada dan atau melalui Lembaga Keuangan untuk diteruskan-pinjamkan kepada end user yang dilakukan dengan cara aliansi strategis (kerjasama).

Kemudahan :

- a) Jaringan BNI tersebar di seluruh Indonesia
- b) Suku bunga bersaing dengan system perhitungan bunga efektif ,
anuitas atau flat.

Persyaratan :

- a) Kelengkapan Ijin/Legalitas usaha yang masih berlaku sesuai
dengan bidang usahanya.
- b) Usaha telah beroperasi komersial minimal 3 (tiga) tahun.

5) Kredit Usaha Rakyat (KUR)

BNI dapat memberikan pembiayaan yang feasible namun belum bankable. Solusinya adalah dengan Kredit Usaha Rakyat yang dapat diberikan kepada calon debitur Usaha Mikro, Kecil, Menengah, Koperasi (UMKMK), kelompok usaha, dan lembaga Linkage.

Kemudahan :

- a) Proses kredit lebih sederhana / cepat.
- b) Dapat digunakan untuk menambah modal kerja usaha dan kredit
investasi.
- c) Jaringan BNI tersebar di seluruh Indonesia

Persyaratan :

- a) Tidak sedang menerima fasilitas kredit dari perbankan lain dan atau
tidak sedang menerima Kredit Program dari Pemerintah.
- b) Pengalaman dibidang usaha minimal 1 (satu) tahun.

- c) Kelengkapan legalitas usaha yang masih berlaku dan sesuai dengan bidang usahanya, untuk permohonan kredit sampai dengan Rp150 juta cukup surat keterangan berusaha dari kelurahan

6) Kredit Ketahanan Pangan Dan Energi (Kkp-E)

BNI merupakan perbankan yang peduli dan mendukung secara penuh terhadap pengembangan usaha para petani, peternak, pekebun, nelayan dan pembudidaya ikan. Melalui Kredit Ketahanan Pangan dan Energi, nasabah bisa mendapatkan pembiayaan Kredit Investasi (KI) dan /atau modal kerja (KMK) antara lain untuk intensifikasi padi, jagung, kedelai, ubi kayu, ubi jalar, pengembangan budidaya tanaman tebu, peternakan sapi potong/ayam/itik dan kepada Koperasi untuk pengadaan pangan berupa gabah, jagung, kedelai dan perikanan.

Kemudahan :

- a) Penyaluran dapat dilakukan secara langsung kepada peserta, Kelompok, Koperasi atau bekerjasama dengan Mitra Usaha.
- b) Suku bunga bersaing, mendapat bantuan subsidi bunga dari pemerintah.
- c) Jaringan BNI tersebar di seluruh Indonesia

Persyaratan :

- a) RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) telah mendapat persetujuan dari pejabat yang diberi kuasa oleh dinas teknis setempat.

7) Kredit Usaha Pembibitan Sapi (KUPS)

BNI memahami yang membutuhkan pembiayaan untuk pembibitan sapi potong dan sapi perah melalui pembiayaan Kredit Usaha Pembibitan Sapi (KUPS).

Kemudahan :

- a) Dapat diberikan untuk pengembangan usaha kepada perusahaan pembibitan, koperasi, Kelompok.
- b) Suku bunga bersaing dan mendapat bantuan subsidi bunga dari pemerintah.
- c) Jaringan BNI tersebar di seluruh Indonesia.

Persyaratan :

- a) Termasuk dalam daftar yang diusulkan memperoleh KUPS yang direkomendasikan oleh instansi yang membidangi fungsi peternakan dan / atau Kesehatan Hewan di Kabupaten/Kota dan atau Direktorat Jenderal Peternakan.
- b) Telah beroperasi minimal selama 2 tahun

8) Kredit Program Revitalisasi Perkebunan - Pola Kemitraan

BNI mendukung percepatan pengembangan perkebunan rakyat melalui pembiayaan Kredit Program Revitalisasi Perkebunan. Melalui kredit program ini, Anda bisa mendapatkan kredit investasi yang dapat digunakan untuk perluasan, peremajaan, dan rehabilitasi tanaman perkebunan (kelapa sawit, karet, kakao) dengan melibatkan

perusahaan dibidang usaha perkebunan sebagai mitra pengembangan kebun, pengolahan dan pemasaran hasil.

Kemudahan:

- a) Jangka waktu pengembalian kredit sampai dengan 12 tahun.
- b) Suku bunga bersaing dan mendapat bantuan subsidi bunga dari pemerintah.
- c) Jaringan BNI tersebar di seluruh Indonesia

Persyaratan:

- a) Berbadan hukum dan memiliki legalitas usaha lengkap dan berlaku.
- b) Telah beroperasi minimal selama 2 tahun.

9) *Two Step Loan*

BNI memahami adanya kebutuhan pembiayaan investasi untuk proyek-proyek industri baik milik Perusahaan Swasta Nasional maupun PMA/Joint Venture yang hasil produksinya berupa komoditi ekspor dan/atau komoditi non ekspor. BNI memiliki solusi pembiayaan *Two Step Loan* yang digunakan untuk membiayai investasi sarana produksi, sarana processing, sarana penunjang baik untuk proyek baru, perluasan, modernisasi maupun rehabilitasi.

Kemudahan :

- a) Jangka waktu kredit bisa disesuaikan dengan kemampuan usaha nasabah
- b) Suku bunga bersaing.

- c) Jaringan BNI tersebar di seluruh Indonesia

Persyaratan :

- a) Kelengkapan Ijin/Legalitas usaha yang masih berlaku sesuai dengan bidang usahanya.
- b) Usaha telah berjalan minimal 2 (dua) tahun (untuk segmen menengah dan korporasi minimal 3 tahun).
- c) Persyaratan lainnya disesuaikan dengan jenis TSL.

10) *Two Step Loan - Iepc 2*

Pembiayaan berupa *Two Step Loan – IEPC 2* yaitu pemberian kredit investasi dan modal kerja kepada industri kecil dan menengah untuk membiayai kegiatan usaha yang berorientasi pada efisiensi industri dan sistem produksi bersih lingkungan.

Kemudahan :

- a) Dapat diberikan kepada individu/perorangan, kelompok usaha kecil, Koperasi atau Badan Usaha yang merencanakan pembelian investasi peralatan lingkungan dan modal kerja yang terkait dengan investasi tersebut.
- b) Suku bunga bersaing
- c) Jaringan BNI tersebar di seluruh Indonesia

Persyaratan :

- a) Kelengkapan Ijin/Legalitas usaha yang masih berlaku sesuai dengan bidang usahanya.

- b) Usaha telah berjalan minimal 2 (dua) tahun (untuk segmen menengah dan korporasi minimal 3 tahun).

11) Kredit Beragunan Deposito Berjangka

Kredit Beragun Deposito Berjangka yaitu fasilitas kredit yang diberikan kepada badan usaha yang telah berbadan hukum (kecuali Yayasan atau Koperasi) dengan agunan hanya berupa deposito berjangka.

Kemudahan :

- a) Membantu perusahaan (pemilik deposito) untuk memperoleh kredit tanpa harus mencairkan depositonya.
- b) Dapat digunakan untuk segala keperluan (penggunaan bebas).
- c) Jaringan BNI tersebar di seluruh Indonesia.

Persyaratan :

- a) Deposito yang dijaminakan adalah Deposito (dengan valuta yang sama)atas nama Pemohon Kredit, Pemilik atau Pengurus perusahaan atau Group Usaha.

B. Pembahasan

Data Khusus

a. Perlakuan Akuntansi Kredit Bermasalah (*Nonperforming Loan*)

Mulai pada tanggal 1 Januari 2010, PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. secara efektif menerapkan PSAK No. 50 (Revisi 2006), “Instrumen Keuangan: Penyajian dan Pengungkapan”, dan PSAK No. 55 (Revisi 2006), “Instrumen

Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran”, dimana PSAK No. 31, “Akuntansi Perbankan”, yang telah diterapkan Bank Negara Indonesia dalam membuat laporan keuangan konsolidasian tahun 2009 telah dicabut. Untuk mengetahui perlakuan akuntansi yang diterapkan oleh PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, dapat dilihat dari penerapan kebijakan akuntansi Bank Negara Indonesia yang berdasarkan Buku Laporan Tahunan 2010, Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan, serta melakukan wawancara dengan pihak-pihak terkait tentang perlakuan akuntansi pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

Sebelum 1 Januari 2010, pinjaman yang diberikan dinyatakan sebesar saldo pinjaman dikurangi dengan penyisihan kerugian penurunan nilai. Sedangkan sejak tanggal 1 Januari 2010, pinjaman yang diberikan pada awalnya diukur dengan nilai wajar ditambah dengan biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dan biaya tambahan untuk memperoleh aset keuangan tersebut dan setelah pengakuan awal diukur pada biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif dikurangi dengan penyisihan kerugian penurunan nilai. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari tabel pemberian kredit berikut ini :

Tabel .1. Pinjaman yang Diberikan Berdasarkan Jenis, Mata Uang dan Transaksi dengan Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa dan Pihak Ketiga

(Disajikan dalam jutaan rupiah)

	2010	2009
Pihak yang mempunyai hubungan istimewa		
Investasi	421.337	351.168
Konsumen	76.198	156.993
Modal kerja	15.523	22.068
Jumlah	513.049	530.187
Pihak Ketiga		
Modal Kerja	54.729.962	52.279.076
Investasi	26.153.680	24.696.566
Konsumen	24.407.377	17.350.042
Sindikasi	9.193.549	7.662.089
karyawan	1.168.431	1.991.787
Progam Pemerintah	388.619	320.378
Jumlah	116.491.618	104.299.938
Mata Uang Asing	2010	2009
Modal Kerja	11.492.197	7.748.598
Sindikasi	4.260.617	4.180.610
Investasi	3.577.902	3.992.816
Konsumen	13.353	71.653
Progam Pemerintah	8.223	19.338
Jumlah Mata Uang Asing	19.352.292	16.013.015
Jumlah Pihak ketiga	135.843.910	120.312.953
Jumlah	136.356.959	120.843.140
Cadangan Kerugian Penurunan nilai	(6.957.392)	(6.920.455)
Bersih	<u>129.399.567</u>	<u>113.922.685</u>

Sumber: PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

Berdasarkan tabel di atas, disimpulkan bahwa jumlah pinjaman yang diberikan oleh Bank Negara Indonesia mengalami peningkatan. Pada tahun 2010, mengalami peningkatan sebesar 13,58 %. Adanya peningkatan kredit pada tahun 2010 menunjukkan tekad Bank Negara Indonesia untuk meningkatkan perannya sebaga lembaga intermediasi.

Pada tanggal 31 Desember 2010 dan 2009, rasio kredit bermasalah bruto (rasio NPL-bruto) Bank Negara Indonesia terhadap jumlah pinjaman yang diberikan adalah sebesar 4,28% dan 4,68%. Sedangkan rasio kredit bermasalah bersih (rasio NPL-bersih) terhadap total pinjaman adalah sebesar 1,11% dan 0,84%. Berdasarkan rasio NPL pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) menunjukkan bahwa secara umum memiliki NPL dibawah standar maksimum dari nilai yang ditetapkan Bank Indonesia sebesar 5% maka dimungkinkan bahwa laba bank masih akan dapat meningkat walaupun NPL naik dan total pinjaman juga naik, sehingga bunga pinjaman yang tidak terbayarkan karena NPL dapat tertutup oleh kenaikan bunga pinjaman akibat realisasi pinjaman baru atau perubahan pinjaman.

Seperti diuraikan pada tabel berikut:

Tabel.2. Rasio Pinjaman Bermasalah PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

Rasio Kredit Bermasalah	Tahun	
	2009	2010
Rasio NPL Bruto	4,28%	4,68%
Rasio NPL Bersih	1,11%	0,84%

Sumber : PT. Bank Negara Indonesia(Persero)Tbk.

Berdasarkan tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa jumlah *nonperforming loan* pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk mengalami penurunan pada tahun 2010.

1) Pengakuan Kredit Bermasalah (*Nonperforming Loan*)

Kategori kredit pada Bank Negara Indonesia berdasarkan tunggakan angsurannya dibagi atas 5 golongan. Golongan I kredit lancar yaitu kredit yang tidak terdapat tunggakan. Setiap tanggal jatuh tempo angsuran, debitur dapat membayar pinjaman pokok dan bunga, Golongan II Kredit dalam perhatian khusus adalah penggolongan kredit yang tertunggak baik angsuran, pinjaman pokok dan pembayaran bunga, akan tetapi tunggakannya sampai dengan 90 hari (tidak melebihi 90 hari kalender). Golongan III kredit kurang lancar terjadi bila debitur tidak dapat membayar angsuran pokok dan/atau bunga antara 91 hari sampai dengan 180 hari. Golongan IV Kredit diragukan terjadi dalam hal debitur tidak dapat membayar angsuran pinjaman pokok dan/atau pembayaran bunga antara 181 hari sampai dengan 270 hari. Golongan V kredit macet yang Kredit macet terjadi bila debitur tidak mampu membayar berturut-turut setelah 270 hari. Kredit bermasalah atau NPL diakui pada saat tunggakan angsuran masuk Golongan III dan seterusnya atau lebih dari 91 hari. Sedangkan untuk Golongan I dan II merupakan *Performing Loan*. Apabila terjadi perubahan kualitas suatu kredit atau perubahan golongan kredit yang diakibatkan adanya keterlambatan pembayaran angsuran bunga dan pokok yang tidak sesuai dengan jadwal

angsuran. Perubahan tersebut dalam pemberian kredit disebut dengan perubahan kolektibilitas kredit.

Tabel.3. Kategori Golongan Berdasarkan Tunggakan Angsuran Bulanan Kredit:

Golongan	Lama tunggakan angsuran	Kategori
Golongan I	0 hari	Lancar
Golongan II	1-90 hari	Dalam perhatian khusus
Golongan III	91 – 180 hari	Kurang lancar
Golongan IV	181 – 270 hari	Diragukan
Golongan V	Lebih dari 270 hari	Macet

Sumber : PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

2) Pengukuran Kredit Bermasalah (*Nonperforming Loan*)

Sebelum 1 Januari 2010, Bank Negara Indonesia menggunakan dasar pengukuran kredit bermasalah dengan konsep *historical cost*, dimana aset dicatat sebesar pengeluaran kas (setara kas) yang dibayar atau sebesar nilai wajar yang dibayar atau sebesar nilai wajar imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan. Sejak 1 Januari 2010, kredit bermasalah diukur dengan penurunan nilai yaitu suatu kondisi dimana terdapat bukti obyektif terjadinya peristiwa yang merugikan akibat satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengukuran awal aset tersebut dan peristiwa merugikan yang berdampak pada estimasi arus kas masa datang aset keuangan yang dapat diestimasi secara handal. Pengukuran tersebut dilakukan secara individual maupun kolektif.

3) Penyajian Kredit Bermasalah

Penyajian kredit bermasalah (*nonperforming loan*) pada laporan keuangan disajikan di neraca atau *on balanced* sebagai komponen aktiva dengan nama rekening “pinjaman yang diberikan” setelah dikurangi penyisihan kerugian penurunan nilai. Secara lebih detail, kredit bermasalah disajikan pada catatan atas laporan keuangan konsolidasian dengan nama kredit yang diberikan (kredit yang diberikan berdasarkan sektor ekonomi dan kolektibilitas setelah dikurangi dan penyisihan kerugian penurunan nilai).

b. Perlakuan Akuntansi Pendapatan Bunga

Sebelum 1 Januari 2010, pendapatan bunga atas pinjaman yang diberikan atau aktiva produktif lainnya diklasifikasikan sebagai sebagai bermasalah diakui pada saat bunga tersebut diterima (*cash basis*). Pada saat pinjaman diklasifikasikan sebagai kredit bermasalah, tagihan bunga yang telah diakui sebelumnya sebagai pendapatan, tetapi belum diterima akan dibatalkan pengakuannya. Selanjutnya bunga yang dibatalkan tersebut diakui sebagai tagihan kontijensi. Penerimaan pembayaran atas pinjaman yang diklasifikasikan sebagai diragukan atau macet dipergunakan terlebih dahulu untuk

mengurangi pokok pinjaman. Kelebihan penerimaan dari pokok pinjaman diakui sebagai pendapatan bunga dalam laporan laba rugi konsolidasian. Pendapatan bunga dari kredit yang direstrukturisasi hanya dapat diakui apabila telah diterima secara tunai sebelum kualitas kredit menjadi lancar.

Sejak 1 Januari 2010, pendapatan dan beban bunga untuk semua instrumen keuangan yang *interest bearing* diakui pada laporan laba rugi konsolidasian dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Suku bunga efektif adalah suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi pembayaran atau penerimaan kas di masa datang selama perkiraan umur dari aset keuangan atau kewajiban keuangan atau kewajiban keuangan (atau, jika lebih tepat, digunakan periode lebih singkat) untuk memperoleh nilai tercatat bersih dari aset keuangan atau kewajiban keuangan. Pada saat menghitung suku bunga efektif, Bank mengestimasi arus kas dimasa datang dengan mempertimbangkan seluruh persyaratan kontraktual dalam instrumen keuangan tersebut, tetapi tidak mempertimbangkan kerugian kredit di masa mendatang. Perhitungan ini mencakup seluruh komisi, provisi, dan bentuk lain yang diterima oleh para pihak dalam kontrak yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari suku bunga efektif, biaya transaksi, dan seluruh premi atau diskon lainnya.

Jika aset keuangan atau kelompok aset keuangan serupa telah diturunkan nilainya sebagai akibat kerugian penurunan nilai, maka pendapatan bunga yang diperoleh setelahnya diakui berdasarkan suku bunga yang digunakan untuk mendiskonto arus kas masa datang dalam menghitung kerugian penurunan nilai. Kredit yang pembayaran angsuran pokok atau bunganya telah lewat 90 hari atau lebih setelah jatuh tempo, atau kredit yang pembayarannya secara tepat waktu diragukan, secara umum diklasifikasikan sebagai kredit yang mengalami penurunan nilai (*impairment*). Bunga yang telah diakui tetapi belum tertagih akan dibatalkan pada saat kredit diklasifikasikan sebagai kredit yang mengalami penurunan nilai.

1) Pengukuran pendapatan bunga

Sebelum 1 Januari 2010, konsep pengukuran pendapatan bunga yang diterapkan oleh Bank Negara Indonesia yaitu dengan menggunakan konsep *Historical Cost* dimana aktiva dicatat sebesar pengeluaran kas (setara kas) yang dibayar atau sebesar nilai yang wajar dari imbalan (*consideration*) yang diberikan untuk memperoleh aktiva tersebut pada saat perolehan. Sejak 1 Januari 2010, Pendapatan diukur dengan nilai wajar imbalan yang diterima atau dapat diterima . Jika arus

masuk dari kas atau setara kas ditangguhkan, maka nilai wajar dari imbalan tersebut mungkin kurang dari jumlah nominal kas yang diterima atau dapat diterima penerimaan antara nilai wajar dan jumlah nominal dari imbalan tersebut diakui sebagai pendapatan bunga sesuai dengan paragraf 28 dan 29 dan sesuai dengan PSAK 55(Revisi 2006).

2) Penyajian Pendapatan Bunga

Pendapatan bunga dari kredit yang *performing* disajikan dalam laporan laba rugi sebagai pendapatan Operasional Utama. Sedangkan, bunga dari kredit yang diklasifikasikan *nonperforming* (kurang lancar, diragukan, dan macet) yang tidak diakui sejak kredit dinyatakan *nonperforming* diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan mengenai komitmen dan kontijensi sebagai Pendapatan Bunga Dalam Penyelesaian. Pendapatan bunga dari kredit bermasalah merupakan kelebihan penerimaan pokok pinjaman setelah penerimaan pembayaran atas pinjaman yang diklasifikasikan sebagai diragukan dan macet digunakan terlebih dahulu untuk mengurangi pokok pinjaman.

c. Penyisihan Kerugian Kredit

Sebelum 1 Januari 2010, bank membentuk Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) dan estimasi kerugian komitmen dan kontijensi berdasarkan *review* dan evaluasi terhadap eksposur tiap debitur. Atau dengan kata lain penentuan cadangan menggunakan konsep ekspektasi (*expectation loss*). Dalam kaitan tersebut, ketentuan Bank Indonesia tentang pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva dan Estimasi Kerugian Komitmen dan Kontijensi yang mempunyai risiko kredit digunakan sebagai acuan. Jumlah minimum penyisihan kerugian penurunan nilai aset serta komitmen dan kontijensi yang memiliki risiko kredit dihitung dengan memperhatikan PBI No.7/2/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 (PBI) 7 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum yang telah diubah dengan PBI No. 8/2/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 tentang Perubahan atas PBI 7 yang diubah kembali dengan PBI No. 9/6/PBI/2007 tanggal 30 Maret 2007 tentang perubahan kedua atas PBI 7, yang mengatur tingkat penyisihan minimum dari penyisihan penghapusan aktiva serta estimasi kerugian komitmen dan kontijensi yang memiliki risiko kredit. Adapun penyisihan minimum yang harus dibentuk sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 4. Penyisihan Minimum sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia

Klasifikasi	Persentase penyisihan kerugian penurunan nilai
Lancar	Minimum 1,00 %
Dalam perhatian khusus	Minimum 5,00 %
Kurang lancar	Minimum 15,00 %
Diragukan	Minimum 50,00 %
Macet	100,00%

Sumber : Bank Indonesia

Persentase penyisihan kerugian penurunan nilai aset diatas diterapkan terhadap saldo aktiva produktif setelah dikurangi dengan nilai agunan sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia, kecuali untuk aktiva produktif yang diklasifikasikan lancar dan tidak dijamin atau yang dijamin dengan agunan non-tunai, dimana persentase penyisihan kerugian penurunan nilai aset diterapkan terhadap saldo aktiva produktif yang bersangkutan dan komitmen dan kontijensi. Penurunan khusus, sekurang-kurangnya :

- 1) 5% dari aset produktif yang digolongkan perhatian khusus setelah dikurangi agunan.
- 2) 15% dari aset produktif yang digolongkan kurang lancar setelah dikurangi agunan.
- 3) 50% dari aset produktif yang digolongkan diragukan setelah dikurangi agunan.
- 4) 100% dari aset produktif yang digolongkan macet setelah dikurangi agunan.

Adapun penggunaan nilai agunan sebagai faktor pengurang

dalam penyisihan kerugian nilai aset tidak dapat dilakukan untuk aktiva non produktif. Penyisihan kerugian penurunan nilai atas aset untuk komitmen dan kontijensi yang dibentuk disajikan sebagai Kewajiban (“Estimasi Kerugian atas Komitmen dan Kontijensi”) pada neraca konsolidasian.

Sejak 1 Januari 2010, bank membentuk Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) berdasarkan data kerugian kredit yang telah terjadi (*incured loss*) yang diambil dari data tiga tahun sebelumnya, bank pada setiap tanggal neraca, bank mengevaluasi apakah terdapat bukti objektif bahwa aset keuangan yang tidak dicatat pada nilai wajar melalui laporan laba rugi telah mengalami penurunan nilai. Aset keuangan mengalami nilai jika bukti objektif menunjukkan bahwa peristiwa yang merugikan telah terjadi setelah pengakuan awal aset keuangan dan peristiwa tersebut berdampak pada arus kas masa datang atas aset keuangan yang dapat diestimasi secara handal. Kriteria yang digunakan untuk menentukan bukti objektif dari penurunan nilai adalah sebagai berikut:

- a. Kesulitan keuangan signifikan yang dialami penerbit atau pihak peminjam.
- b. Pelanggaran kontrak, seperti terjadinya wanprestasi atau tunggakan pembayaran pokok atau bunga.

- c. Pihak pemberi pinjaman dengan alasan ekonomi atau hukum sehubungan dengan kesulitan keuangan yang dialami oleh pihak peminjam, memberikan keringanan pada pihak peminjam yang tidak mungkin diberikan jika pihak peminjam tidak mengalami kesulitan tersebut.
- d. Terdapat kemungkinan bahwa pihak peminjam akan dinyatakan pailit atau melakukan reorganisasi keuangan lainnya.
- e. Hilangnya pasar aktif dari aset keuangan akibat kesulitan keuangan.

Data yang dapat diobservasi mengindikasikan adanya penurunan yang dapat diukur atas estimasi arus kas masa datang dari kelompok aset keuangan sejak pengakuan awal aset dimaksud, meskipun penurunannya belum dapat diidentifikasi terhadap aset keuangan secara individual dalam kelompok aset tersebut termasuk:

- a. Memburuknya status pembayaran pihak peminjam dalam kelompok tersebut.
- b. Kondisi ekonomi nasional atau lokal yang berkorelasi dengan wanprestasi atas aset dalam kelompok tersebut.

Bank pertama kali menentukan apakah terdapat bukti obyektif penurunan nilai secara individual atas aset keuangan yang signifikan secara individual atau kolektif untuk aset

keuangan yang tidak signifikan secara individual. Jika bank menentukan tidak terdapat bukti objektif mengenai penurunan nilai atas aset keuangan yang dinilai secara individual, terlepas aset tersebut signifikan atau tidak, maka bank memasukkan aset tersebut kedalam kelompok aset keuangan yang memiliki karakteristik risiko kredit yang serupa dan menilai penurunan nilai kelompok tersebut secara kolektif. Aset keuangan yang penurunan nilainya dilakukan secara individual, dan untuk itu kerugian penurunan nilai telah diakui atau tetap diakui tidak termasuk dalam penilaian penurunan nilai secara kolektif.

Bank menetapkan kredit yang harus dievaluasi penurunan nilainya secara individual, jika memenuhi salah satu kriteria dibawah ini:

- a. Kredit yang secara individual memiliki nilai signifikan dan memiliki bukti objektif penurunan nilai.
- b. Kredit yang distrukturisasi yang secara individual memiliki nilai signifikan.

Berdasarkan kriteria diatas, Bank melakukan penilaian secara individual untuk:

- a. Pinjaman dalam segmen pasar korporasi dan usaha menengah dengan kolektibilitas kurang lancar, diragukan, dan macet.
- b. Pinjaman dalam segmen pasar korporasi dan usaha

menengah yang direstrukturisasi.

Bank menetapkan kredit yang harus dievaluasi penurunan nilainya secara kolektif jika memenuhi salah satu kriteria dibawah ini:

- a. Kredit yang secara individual memiliki nilai signifikan namun tidak memiliki bukti obyektif penurunan nilai.
- b. Kredit yang secara individual memiliki nilai tidak signifikan.
- c. Kredit yang direstrukturisasi yang secara individual memiliki nilai tidak signifikan.

Berdasarkan kriteria diatas, penilaian secara kolektif dilakukan untuk:

- a. Pinjaman dalam segmen pasar korporasi dan usaha menengah dengan kolektibilitas lancar dan dalam perhatian khusus serta tidak direstrukturisasi.
- b. Pinjaman dalam segmen pasar usaha kecil dan konsumen.

Sesuai dengan Lampiran Surat Edaran Bank Indonesia No. 11/33/DPNP tanggal 8 Desember 2009 (SE-BI), Bank menentukan penyisihan kerugian penurunan nilai kredit secara kolektif dengan mengacu pada pembentukan penyisihan umum dan penyisihan khusus sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia mengenai penilaian kualitas aktiva bank umum. Penyisihan kolektif untuk kredit yang dikelompokkan sebagai dalam

perhatian khusus, kurang lancar, diragukan dan macet, dihitung setelah dikurangi dengan nilai agunan yang diperkenankan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia. Perhitungan penyisihan kerugian penurunan nilai berdasarkan nilai tercatat (biaya perolehan amortisasi). Jika persyaratan kredit yang diberikan dinegosiasi ulang atau dimodifikasi karena debitur atau nasabah mengalami kesulitan keuangan, maka penurunan nilai diukur dengan suku bunga efektif awal yang digunakan sebelum persyaratan diubah.

Tabel .5. Perubahan Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai
(Disajikan dalam jutaan rupiah)

	2010	2009
Saldo awal	6.920.455	5.652.046
Penyesuaian saldo awal sehubungan dengan penerapan PSAK No. 55 (Revisi 2006)	315.125	-
Penyisihan kerugian selama tahun berjalan	3.883.718	3.263.472
Penerimaan kembali pinjaman yang telah dihapusbukukan	357.861	741.919
Penghapusan selama tahun berjalan	(4.449.090)	(3.330.629)
Penyesuaian karena penjabaran mata uang asing	(70.677)	593.647
Saldo akhir	<u>6.957.392</u>	<u>6.920.455</u>

Sumber : PT.Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

d. Pinjaman yang Direstrukturisasi

Kemampuan BNI dalam merestrukturisasi kredit berdampak kepada tingkat dan hasil operasi BNI. BNI memiliki restrukturisasi kredit yang dapat disesuaikan untuk debitur berdasarkan negosiasi

dan perjanjian antara debitur dan BNI. Untuk kredit-kredit berjumlah besar, BNI dapat menggunakan jasa konsultan internasional atau pihak ketiga yang ahli dalam melakukan *due-dilligence* atas kinerja keuangan, bisnis dan operasional debitur dan membuat laporan rekomendasi skema pembayaran kredit oleh debitur tersebut. Setelah strategi restrukturisasi telah disetujui, maka BNI akan mempersiapkan dokumen-dokumen untuk mengimplementasikan restrukturisasi tersebut.

Sebelum 1 Januari 2010, restrukturisasi kredit pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. meliputi modifikasi persyaratan kredit, modifikasi kredit menjadi saham atau instrumen keuangan lainnya dan/atau kombinasi dari keduanya. Kerugian yang timbul dari restrukturisasi kredit yang berkaitan dengan modifikasi persyaratan kredit hanya diakui bila nilai tunai penerimaan kas masa depan yang telah ditentukan dalam persyaratan kredit baru, termasuk penerimaan yang diperuntukkan sebagai bunga maupun pokok adalah lebih kecil dari nilai kredit yang diberikan yang tercatat sebelum direstrukturisasi.

Untuk restrukturisasi kredit bermasalah dengan cara konversi kredit yang diberikan menjadi saham atau instrumen keuangan lainnya, kerugian dari restrukturisasi kredit diakui hanya apabila nilai wajar penyertaan saham atau instrumen keuangan yang diterima dikurangi estimasi biaya untuk menjualnya adalah kurang dari nilai

tercatat kredit yang diberikan.

Tunggakan pokok yang dikapitalisasi menjadi pokok kredit yang baru dalam rangka restrukturisasi kredit dicatat sebagai pendapatan bunga yang ditangguhkan dan akan diakui sebagai pendapatan dengan cara amortisasi secara proporsional berdasarkan persentase tagihan bunga *non performing* yang dikapitalisasi terhadap pokok kredit baru dikalikan dengan angsuran pokok yang diterima. Biaya-biaya yang dikeluarkan oleh BNI dalam restrukturisasi kredit bermasalah dicatat sebagai biaya pada saat terjadinya.

Setelah tanggal 1 Januari 2010, saat persyaratan kredit telah dinegosiasi ulang atau dimodifikasi (kredit restrukturisasi), penurunan nilai yang ada diukur dengan menggunakan suku bunga efektif awal yang digunakan sebelum persyaratan diubah dan kredit tidak lagi diperhitungkan sebagai menunggak. Manajemen secara berkelanjutan mereview kredit yang dinegosiasi ulang untuk meyakinkan terpenuhinya seluruh kriteria dan pembayaran di masa depan. Jika pada periode berikutnya jumlah penurunan kerugian nilai berkurang dan pengurangan tersebut dapat dikaitkan secara objektif pada peristiwa yang terjadi setelah penurunan nilai diakui seperti meningkatnya peringkat kredit debitur, maka kerugian penurunan nilai yang sebelumnya diakui harus dipulihkan dengan menyesuaikan akun cadangan. Jumlah pemulihan aset keuangan diakui pada laporan laba rugi konsolidasian.

Tabel .6. Pinjaman yang Direstrukturisasi Berdasarkan Kolektibilitas

(Disajikan dalam jutaan rupiah)

	2010	2009
Lancar	2.209.785	4.129.772
Dalam perhatian khusus	4.012.176	5.416.682
Kurang lancar	581.607	703.612
Diragukan	166.053	396.284
Macet	1.069.922	1.249.195
Jumlah	8.039.543	11.895.545
Penyisihan kerugian penurunan nilai	(2.532.846)	(2.601.201)
Bersih	<u>5.506.697</u>	<u>9.294.344</u>

Sumber: PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

e. Penghapusan Kredit

Dari seluruh kredit yang disalurkan oleh bank kepada debitur, tidak semuanya lancar. Pada umumnya sebagian besar kredit yang diberikan oleh Bank masuk dalam golongan kredit lancar, dan sebagian kecil masuk dalam golongan kredit macet. Kredit yang telah digolongkan dalam kolektibilitas macet pada waktunya atas pertimbangan tertentu dapat dihapusbukukan. Bank dapat melakukan penghapusbukuan atas kredit macet. Pinjaman yang diberikan dihapusbukukan ketika tidak terdapat prospek yang realistis mengenai pengembalian pinjaman atau hubungan normal antara antara BNI dan debitur telah berakhir Sebelum 1 Januari 2010, saldo aktiva produktif yang memiliki kualitas macet dihapusbukukan dengan penyisihan kerugian nilai sebesar nilai aktiva produktifnya, pada saat manajemen berpendapat bahwa aktiva produktif tersebut sulit untuk direalisasi atau ditagih. Penerimaan kembali aktiva

produktif yang telah dihapusbukukan dicatat sebagai penambahan penyisihan kerugian penurunan nilai aktiva produktif pada tahun penerimaan kembali terjadi. Jika penerimaan melebihi nilai pokoknya, kelebihan tersebut diakui sebagai pendapatan bunga.

Sejak 1 Januari 2010, pinjaman yang diberikan dihapusbukukan ketika tidak terdapat prospek penerimaan yang realistis mengenai pengembalian pinjaman atau hubungan normal antara bank dan debitur telah berakhir. Pinjaman yang tidak dapat dilunasi tersebut dihapusbukukan dengan mendebit penyisihan kerugian nilai. Penerimaan kembali atas aset keuangan yang diberikan yang telah dihapusbukukan pada tahun berjalan dikreditkan dengan menyesuaikan akun penyisihan kerugian penurunan nilai. Penerimaan kembali atas pinjaman yang diberikan yang telah dihapusbukukan pada tahun-tahun sebelumnya dicatat sebagai pendapatan operasional selain bunga.

Kredit yang dihapusbukukan bukan berarti dihapustagihkan, bank tetap mempunyai kewajiban untuk melakukan tagihan kredit macet kepada debitur. Kredit yang telah dihapus buku, tetap dicatat secara *extracomptable* agar kewajiban debitur dapat diketahui setiap saat dalam rangka penagihan/pembuktian kepada debitur.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bagian pembahasan, disimpulkan perlakuan akuntansi kredit bermasalah (*nonperforming loan*) pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. adalah:

- 1) Tanggal 1 Januari 2010 Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 31 revisi 2000 efektif maka laporan keuangan perbankan Indonesia mengacu pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 50 revisi 2006 “Instrumen Keuangan: Penyajian dan Pengungkapan”, serta Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 55 revisi 2006 “Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran”. Sebelum PSAK No. 31 dicabut, perlakuan akuntansi *nonperforming loan* pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. menggunakan konsep *historical cost*, yaitu aset dicatat sebesar pengeluaran kas (atau setara kas) yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan (*consideration*) yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan. Sedangkan setelah PSAK 31 efektif dicabut, perlakuan akuntansi *nonperforming loan* pada PT. Bank Negara Indonesia menggunakan konsep nilai wajar yang diukur dengan penurunan nilai yang merugikan akibat satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengukuran awal aset tersebut dan peristiwa merugikan yang berdampak pada estimasi arus kas masa datang aset keuangan yang dapat diestimasi secara handal.

Pengukuran tersebut dilakukan secara individual maupun kolektif.

- 2) Perlakuan akuntansi *nonperforming loan* yang berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 50 dan 55 revisi 2006 lebih baik dari Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 31 revisi 2000, sebab penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 50 dan 55 revisi 2006 tidak memungkinkan perbankan mengatur besarnya pencadangannya untuk tujuan tertentu. Untuk menentukan cadangan (Cadangan Kerugian Penurunan Nilai/CKPN) berdasarkan data kerugian kredit yang telah terjadi (*incured loss*) yang diambil dari data tiga tahun sebelumnya. Sedangkan penentuan pencadangan sebelumnya (Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif/PPAP) menggunakan ekspektasi kerugian kredit (*expectation loss*) yang ditentukan oleh perbankan tersebut. Dengan kata lain bahwa penerapan regulasi ini bank sulit untuk merekayasa laporan keuangannya karena memakai sumber data yang diambil dari data-data transaksi minimal tiga tahun atau maksimal lima tahun sebelumnya. Beberapa kasus yang terjadi bahwa perbankan memoles laporan keuangannya dengan memperbesar PPAP-nya sehingga akan mempengaruhi kinerjanya. Penerapan PSAK 50 dan 55 ini perbankan dituntut untuk menyajikan transaksi keuangan dan keterbukaan informasi.

B. Saran

Dampak dari konvergensi ke standar akuntansi internasional Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 31 Revisi 2000 Akuntansi Perbankan, sebagai gantinya bank diwajibkan menerapkan Pernyataan

Standar Akuntansi Keuangan No. 50 dan 55 Revisi 2006. Dengan diberlakukannya kedua PSAK tersebut tentu akan mengakibatkan perubahan dalam memperlakukan kredit bermasalah tersebut, oleh karena itu perlu dilakukan sosialisasi pengawasan mengingat konvergensi ini baru dilakukan pada sektor perbankan di Indonesia

DAFTAR PUSTAKA

- Firdaus A Dunia. 2005. *Ikhtisar Lengkap Pengantar Akuntansi*. Jakarta : Lembaga Penerbit Universitas Indonesia
- Gatot Suparmo. 2009 . *Perbankan dan Masalah Kredit : Suatu Tinjauan di Bidang Yuridis*. Jakarta : Rineka Cipta
- Hasibuan, Malayu. 2006. *Dasar-dasar Perbankan*. Edisi kelima. Jakarta : PT. Bumi Aksara
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2000. *Standar Akuntansi Keuangan*. Jakarta : Salemba Empat
- _____. 2001. Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia, Revisi 2000. Jakarta: Diterbitkan atas kerja sama dengan Bank Indonesia
- _____. 2007. *Standar Akuntansi Keuangan*. Jakarta: Salemba Empat
- _____. 2008. Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia. Jakarta: Diterbitkan atas kerjasama dengan Bank Indonesia
- _____. 2012. *Standar Akuntansi Keuangan*. Jakarta : Salemba Empat
- Indra Bastian dan Suharjono. 2006. *Akuntansi Perbankan*. Edisi Pertama. Jakarta: Salemba Empat
- Ismail. 2010. *Akuntansi Bank*. Jakarta : Penerbit Kencana
- Iswi Hariyani. 2010. *Restrukturisasi dan Penghapusan Kredit Macet*. Jakarta : PT. Elex Media Komputindo
- Kusnadi, Cashin, Polimeni dan Ralph S. 2000. *Pengantar Akuntansi Keuangan*. Jakarta: PT. Grafindo
- Muhammad Tjoekam. 1999. *Perkreditan Bisnis Inti PerBankan*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama
- Teguh Pudjo Mulyono. 2002. Aplikasi Akuntansi Manajemen: Dalam Praktik Perbankan. Edisi 3. Yogyakarta : BPF Maria, Evi. 2007. *Akuntansi untuk Perusahaan Jasa*. Yogyakarta : Edisi pertama
- Gaya media Siamat, Dahlan. 2001. *Manajemen Bank Umum*. Jakarta : Penerbit Intermedia

Peraturan Perundang-undangan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Perbankan

Sofyan Syafri Harahap. 2005. *Teori Akuntansi*. Edisi revisi. Jakarta : PT.Rajagrafindo Persada

www.bi.co.id (diakses pada tanggal 7 oktober 2014)

www.bni.co.id (diakses pada tanggal 5 oktober 2014)

LAMPIRAN



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
FAKULTAS EKONOMI

Alamat: Karangmalang Yogyakarta 55281
Telp. (0274) 586168 Ext. 817 Fax. (0274) 554902
Website : <http://www.fe.uny.ac.id> e-mail : fe@uny.ac.id

Nomor : 1658/UN34.18/LT/2014

25 September 2014

Lampiran : 1 Bendel Proposal

Hal : Permohonan Ijin Penelitian

Yth.

Pimpinan PT. Bank Negara Indonesia

Jalan Kaliurang KM 4, Bulak Sumur Blok H No. 4

Yogyakarta

Kami sampaikan dengan hormat permohonan Ijin Penelitian Tugas Akhir Skripsi bagi mahasiswa :

Nama : Damar Pamungkas

NIM : 12812147011

Jurusan/Prodi : Pendidikan Akuntansi/Akuntansi

Judul : Perlakuan Akuntansi Kredit Bermasalah (*Non Performing Loan*) Kesesuaiannya Sebelum dan Sesudah Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 31 Efektif Dicaput pada PT. Bank Negara Indonesia (PERSERO) Tbk.

Atas kerjasama dan ijinnya diucapkan terima kasih.

Wakil Dekan I.



Prof. Dr. Merdiyanto, M.Pd., MM
NIP. 19580507 198303 1 001

Tembusan :

1. Sub. Bagian Pendidikan:



UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
FAKULTAS EKONOMI

PERMOHONAN IJIN SURVEY/OBSERVASI/PENELITIAN

FRM/FISE/33-00
31 Juli 2008

Kepada Yth. Kep. PT. BANK NEGARA INDONESIA (lembaga yang dituju)
Alamat Jalan Kalurang Km 4 Bulaksumur blok H no. 4
Kota Yogyakarta

Peserta Survey/Observasi/Penelitian

Nama : Damar Pamungkas No. Mhs. : 12812147011

Jurusan : PKS Akuntansi S1

Juml. Peserta : 1

Nama Mata Kuliah

Skripsi

Judul Makalah untuk mata kuliah TAS/TABS

PERUKUAN AKUNTANSI KREDIT BERMASALAH (NON PERFORMING LOAN)
KESESUAIAN SEBELUM DAN SETERUS PERKUTARAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN
NO. 31 EFEKTIF DICABUT PAPA PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSEPO) Tbk.

Mengetahui,
Dosen Pembimbing

Aronita Novi Yushita SE

197708107006042002

Pemohon,

Damar Pamungkas

12812147011

Catatan: Untuk satu alamat, sebaiknya satu surat permohonan observasi, agar instansi/industri tidak melayani secara terus menerus. Lapornya bisa dibuat menurut kelompoknya.

	RASIO	FORMULA	KETERANGAN
1.	NPL	$\frac{\text{Kredit Bermasalah}}{\text{Total Kredit}}$	<ul style="list-style-type: none"> • Kredit merupakan kredit yang diberikan kepada pihak ketiga (tidak termasuk kredit kepada bank lain). • Kredit bermasalah adalah kredit dengan kualitas kurang lancar, diragukan dan macet. • Kredit bermasalah dihitung • secara <i>gross</i> (tidak dikurangi PPAP). • Angka dihitung per posisi (tidak disetahunkan).
2.	Aktiva produktif bermasalah (Aktiva produktif bermasalah terhadap total aktiva produktif)	$\frac{\text{Aktiva produktif bermasalah}}{\text{Total Aktiva Produktif}}$	<ul style="list-style-type: none"> • Cakupan komponen aktiva produktif sesuai ketentuan yang berlaku. • Aktiva produktif bermasalah adalah aktiva produktif dengan kualitas kurang lancar, diragukan dan macet. • Aktiva produktif bermasalah dihitung secara <i>gross</i> (tidak dikurangi PPAP). • Angka dihitung per posisi (tidak disetahunkan).
3.	NPL <i>Net</i>	$\frac{\text{Kredit Bermasalah-CKPN}}{\text{kredit Total Kredit}}$	<ul style="list-style-type: none"> • Kredit adalah sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia

			<p>mengenai penilaian kualitas bank umum.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kredit bermasalah adalah kredit dengan kualitas kurang lancar, diragukan, dan macet. • Kredit bermasalah dihitung berdasarkan nilai tercatat dalam neraca. • CKPN Kredit adalah cadangan wajib dibentuk Bank sesuai ketentuan PSAK mengenai instrumen keuangan PAPI, yang mencakup CKPN kredit secara individual dan kolektif. • Ttal kredit dihitung berdasarkan nilai tercatat dalam neraca, secara <i>gross</i> (sebelum dikurangi CKPN). • Angka dihitung per posisi (tidak disetahukan).
4.	NPL <i>GROSS</i>	<u>Kredit Bermasalah</u> <u>Total kredit</u>	<ul style="list-style-type: none"> • Kredit adalah kredit sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai penilaian kualitas aset bank umum. • Kredit bermasalah adalah kredit dengan kualitas

			<p>kurang lancar, diragukan, dan macet.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kredit bermasalah dihitung berdasarkan nilai tercatat dalam neraca, secara <i>gross</i> (sebelum dikurangi CKPN). • Angka dihitung per posisi (tidak disetahukan).
5.	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) aset terhadap keuangan produktif.	<p><u>CKPN aset keuangan</u></p> <p>Total aset produktif (diluar transaksi rekening administratif)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • CKPN adalah cadangan yang wajib dibentuk Bank sesuai ketentuan dalam pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) mengenai instrumen keuangan dan pedoman akuntansi perbankan Indonesia (PAPI) yang mencakup CKPN kolektif • Cakupan aset produktif sesuai ketentuan Bank Indonesia kualitas aset Bank umum • Total Aset Produktif dihitung berdasarkan nilai tercatat dalam neraca sebelum dikurangi CKPN
6.	PPAP terhadap aktiva Produktif (Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif terhadap total aktiva produktif)	<p>Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif yang telah dibentuk</p> <hr/> <p>Total aktiva produktif</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Cakupan komponen aktiva • Produktif sesuai ketentuan Kualitas Aktiva Produktif yang berlaku.

			<ul style="list-style-type: none"> • Angka dihitung per posisi (tidak disetahunkan)
7.	Pemenuhan PPAP (Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif yang telah dibentuk terhadap Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif yang wajib dibentuk)	$\frac{\text{Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif yang telah dibentuk}}{\text{Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif yang wajib dibentuk}}$	<ul style="list-style-type: none"> • Perhitungan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif yang wajib dibentuk dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.

The original consolidated financial statements included herein
are in Indonesian language.

**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
DAN ANAK PERUSAHAAN
NERACA KONSOLIDASIAN
31 Desember 2010 dan 2009
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED BALANCE SHEETS
December 31, 2010 and 2009
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

	2010	Catatan/ Notes	2009	
ASET				ASSETS
Kas	5.480.703	2a,2c,3	4.903.318	Cash
Giro pada Bank Indonesia	13.563.799	2a,2c,2e,4	8.531.044	Current accounts with Bank Indonesia
Giro pada bank lain setelah dikurangi penyisihan kerugian penurunan nilai sebesar RpNihil pada tahun 2010 dan Rp69.276 pada tahun 2009	1.344.771	2a,2c,2e, 2f,5	6.858.342	Current accounts with other banks, net of allowance for impairment losses of RpNil in 2010 and Rp69,276 in 2009
Penempatan pada bank lain dan Bank Indonesia setelah dikurangi penyisihan kerugian penurunan nilai sebesar Rp1.310 pada tahun 2010, dan Rp229.550 pada tahun 2009	38.385.316	2a,2c,2f,2f,6	29.622.162	Placements with other banks and Bank Indonesia, net of allowance for impairment losses of Rp1,310 in 2010 and Rp229,550 in 2009
Surat-surat berharga setelah dikurangi penyisihan kerugian penurunan nilai sebesar Rp47.918 pada tahun 2010, dan Rp317.584 pada tahun 2009	13.181.480	2a,2c,2g,2f,7	19.197.927	Marketable securities, net of allowance for impairment losses of Rp47,918 in 2010 and Rp317,584 in 2009
Wesel ekspor dan tagihan lainnya setelah dikurangi penyisihan kerugian penurunan nilai sebesar Rp19.422 pada tahun 2010, dan Rp19.207 pada tahun 2009	888.460	2c,2i,2f,8	888.764	Bills and other receivables, net of allowance for impairment losses of Rp19,422 in 2010 and Rp19,207 in 2009
Tagihan akseptasi setelah dikurangi penyisihan kerugian penurunan nilai sebesar Rp52.613 pada tahun 2010 dan Rp63.479 pada tahun 2009	4.778.440	2c,2f, 2m,9,36	4.729.379	Acceptances receivable, net of allowance for impairment losses of Rp52,613 in 2010 and Rp63,479 in 2009
Tagihan derivatif setelah dikurangi penyisihan kerugian penurunan nilai sebesar RpNihil pada tahun 2010 dan Rp92 pada tahun 2009	7.552	2c,2j, 2f,10,21	7.301	Derivatives receivable, net of allowance for impairment losses of RpNil in 2010 and Rp92 in 2009

The original consolidated financial statements included herein are in Indonesian language.

**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
DAN ANAK PERUSAHAAN
NERACA KONSOLIDASIAN (lanjutan)
31 Desember 2010 dan 2009
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED BALANCE SHEETS (continued)
December 31, 2010 and 2009
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

	2010	Catatan/ Notes	2009	
EKUITAS				EQUITY
Modal saham:				Share capital:
- Seri A Dwiwarna - nilai nominal Rp7.500 per saham (dalam Rupiah penuh)				- Class A Dwiwarna - Rp7,500 par value per share (in full Rupiah amount)
- Seri B - nilai nominal Rp7.500 per saham (dalam Rupiah penuh)				- Class B - Rp7,500 par value per share (in full Rupiah amount)
- Seri C - nilai nominal Rp375 per saham (dalam Rupiah penuh)				- Class C - Rp375 par value per share (in full Rupiah amount)
Modal dasar:				Authorized:
- Seri A Dwiwarna - 1 saham				- Class A Dwiwarna - 1 share
- Seri B - 289.341.866 saham				- Class B - 289,341,866 shares
- Seri C - 34.213.162.660 saham				- Class C - 34,213,162,660 shares
Modal ditempatkan dan disetor penuh:				Issued and fully paid:
- Seri A Dwiwarna - 1 saham				- Class A Dwiwarna - 1 share
- Seri B - 289.341.866 saham				- Class B - 289,341,866 shares
- Seri C - 18.359.314.591 saham (2010)				- Class C - 18,359,314,591 shares (2010)
- Seri C - 14.984.598.643 saham (2009)	9.054.807	24	7.789.288	- Class C - 14,984,598,643 shares (2009)
Tambahan modal disetor	14.568.468	2a, 24	5.617.599	Additional paid-in capital
Rugi yang belum direalisasi atas surat-surat berharga dan Obligasi Pemerintah dalam kelompok tersedia untuk dijual setelah pajak tangguhan	(361.009)	2g, 7, 12, 22	(924.402)	Unrealized losses on available-for-sale securities and Government Bonds, net of deferred tax
Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	32.568	2d	6.903	Exchange difference on translation of foreign currency financial statements
Rugi yang belum direalisasi atas transaksi lindung nilai	(165.644)		(148.374)	Unrealized losses on hedging activity
Saldo laba *)				Retained earnings *)
Dicadangkan				Appropriated
Cadangan umum dan wajib	1.523.788	26	1.272.833	General and legal reserves
Cadangan khusus	1.100.846	27	867.286	Specific reserves
Tidak dicadangkan	7.365.802		4.662.449	Unappropriated
	9.990.436		6.802.568	
JUMLAH EKUITAS	33.118.828		19.143.682	TOTAL EQUITY
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	248.680.628		227.488.987	TOTAL LIABILITIES AND EQUITY

*) Saldo rugi sebesar Rp58.905.232 pada tanggal 30 Juni 2003 telah dieliminasi dengan tambahan modal disetor, laba yang belum direalisasi atas surat-surat berharga dalam kelompok tersedia untuk dijual, cadangan penilaian kembali aset, cadangan khusus dan cadangan umum dan wajib pada saat kuasi-reorganisasi BNI pada tanggal 30 Juni 2003.

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

*) Accumulated losses of Rp58,905,232 as of June 30, 2003 has been eliminated against additional paid-in capital, unrealized gains on available-for-sale securities, assets revaluation reserves, specific reserves, and general and legal reserves during BNI's quasi-reorganization as of June 30, 2003.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements.

The original consolidated financial statements included herein are in Indonesian language.

**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
DAN ANAK PERUSAHAAN
LAPORAN LABA RUGI KONSOLIDASIAN
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2010 dan 2009
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK
AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF INCOME
Years Ended
December 31, 2010 and 2009
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

	2010	Catatan/ Notes	2009	
PENDAPATAN BUNGA DAN SYARIAH				INTEREST AND SHARIA INCOME
Pendapatan bunga dan syariah	18.837.397	2x,28	18.878.575	Interest and sharia income
Provisi dan komisi atas pinjaman yang diberikan	-	2y	568.191	Fees and commissions on loans
JUMLAH PENDAPATAN BUNGA DAN SYARIAH	18.837.397		19.446.766	TOTAL INTEREST AND SHARIA INCOME
BEBAN BUNGA, BONUS DAN BEBAN PEMBIAYAAN LAINNYA				INTEREST EXPENSE, BONUS AND OTHER FINANCING CHARGES
Beban bunga dan bonus	(7.099.714)	2x,29	(8.294.120)	Interest expense and bonus
Pembiayaan lainnya	(16.966)		(19.878)	Other financing charges
JUMLAH BEBAN BUNGA, BONUS DAN BEBAN PEMBIAYAAN LAINNYA	(7.116.680)		(8.313.998)	TOTAL INTEREST EXPENSE, BONUS AND OTHER FINANCING CHARGES
PENDAPATAN BUNGA DAN SYARIAH BERSIH	11.720.717		11.132.768	NET INTEREST AND SHARIA INCOME
PENDAPATAN OPERASIONAL LAINNYA				OTHER OPERATING INCOME
Provisi dan komisi lainnya	2.386.391		2.231.196	Other fees and commissions
Penerimaan kembali aset yang telah dihapusbukukan	1.821.088		-	Recovery of assets written off
Pendapatan premi asuransi	1.328.098	2ab	1.026.573	Insurance premium income
Keuntungan yang belum direalisasi dari penurunan/kenaikan nilai wajar surat-surat berharga dan Obligasi Pemerintah	233.629	2g	19.030	Unrealized gain on marketable securities and Government Bonds
Keuntungan dari penjualan Surat-surat berharga dan Obligasi Pemerintah	727.092		405.398	Gain on sales of marketable securities and Government Bonds
Laba selisih kurs - bersih	177.308	2d	261.966	Net foreign exchange gains
Lain-lain	387.447	30	351.222	Miscellaneous
JUMLAH PENDAPATAN OPERASIONAL LAINNYA	7.081.068		4.286.386	TOTAL OTHER OPERATING INCOME
PEMBENTUKAN PENYISIHAN KERUGIAN PENURUNAN NILAI ATAS ASET KEUANGAN DAN NON-KEUANGAN	(3.828.386)	2i,7,9 6,8,11,15	(4.060.809)	PROVISION OF ALLOWANCE FOR IMPAIRMENT LOSSES ON FINANCIAL AND NON-FINANCIAL ASSETS

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements.

PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY (continued)
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

⁷ Accumulated losses of \$458,905,232 as of June 30, 2003 are shown allocated against additional paid-in capital, unrealized gains on available-for-sale securities, assets revaluation reserves, specific reserves and general and legal reserves during ERI's quasi-reorganization as of June 30, 2003.

Click to fill the window with each page and scroll through pages continuously

[illegible]

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements.

The original consolidated financial statements included herein are in Indonesian language.

**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
DAN ANAK PERUSAHAAN
LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2010 dan 2009
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK
AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF CASH FLOWS
(continued)
Years Ended December 31, 2010 and 2009
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

	2010	2009	
KAS DAN SETARA KAS TERDIRI DARI:			COMPONENTS OF CASH AND CASH EQUIVALENTS:
Kas	5.480.703	4.903.316	Cash
Giro pada Bank Indonesia	13.563.799	8.531.044	Current accounts with Bank Indonesia
Giro pada bank lain	1.344.771	6.927.618	Current accounts with other banks
Penempatan pada bank lain - jangka waktu jatuh tempo tiga bulan atau kurang sejak tanggal perolehan	28.467.698	29.795.428	Placements with other banks - maturing within three months or less since the acquisition date
Sertifikat Bank Indonesia - jangka waktu jatuh tempo tiga bulan atau kurang sejak tanggal perolehan	-	11.463.877	Certificates of Bank Indonesia - maturing within three months or less since the acquisition date
Jumlah kas dan setara kas	48.868.871	61.821.283	Total cash and cash equivalents
AKTIVITAS YANG TIDAK MEMPENGARUHI ARUS KAS			ACTIVITIES NOT AFFECTING CASH FLOWS
Penghapusbukuan pinjaman yang diberikan	4.449.090	3.330.629	Loans written off
Laba yang belum direalisasi atas kenaikan nilai surat-surat berharga dan Obligasi Pemerintah dalam kelompok tersedia untuk dijual setelah pajak tangguhan	563.393	1.795.796	Unrealized gains on increase in value of available-for-sale securities and Government Bonds - net of deferred tax
Laba yang belum direalisasi atas kenaikan nilai surat-surat berharga dan Obligasi Pemerintah dalam kelompok diperdagangkan	233.629	19.030	Unrealized gains on increase in value of securities and Government Bonds for trading

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements.

